

INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KABUPATEN BANYUMAS 2020-2021



INDIKATOR TUJUAN

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

KABUPATEN BANYUMAS

2020-2021



INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KABUPATEN BANYUMAS 2020-2021

No. Publikasi : 33020.2236
Katalog : 3102033.3302
Ukuran Buku : 21 cm x 29,7cm
Jumlah Halaman : xii+ 91 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas

Gambar Cover oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas

Dicetak oleh:

-

Sumber Ilustrasi:

Freepik.com, canva.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau mengandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab Umum :
Ir. Suprih Handayani, M.E.

Editor :
Fitria Hernawati, S.ST.

Penyusun:
Dwi Asih Septi Wahyuni, S.ST., M.Si.

Desain/Layout :
Dwi Asih Septi Wahyuni, S.ST., M.Si.

<https://bainunpaskab.bps.go.id>



KATA PENGANTAR



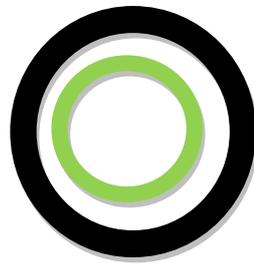
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2020-2021 merupakan salah satu publikasi tahunan yang diterbitkan BPS Kabupaten Banyumas tahun 2022. Indikator-indikator pembangunan berkelanjutan baik sosial ekonomi dan lingkungan disusun berdasarkan data yang bersumber dari BPS dan institusi lainnya yang disesuaikan dengan indikator Sustainable Development Goals (SDG's) yang merupakan agenda dunia yang harus dicapai pada tahun 2030. Pembangunan berkelanjutan merupakan bentuk pembangunan yang lebih mengakomodir keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial serta kelestarian lingkungan.

Publikasi Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini diharapkan mampu memberikan gambaran pencapaian pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan di Indonesia. Selain itu jugadiharapkan dapat memberikan pemahaman tentang berbagai dimensi pembangunan berkelanjutan dan indikator-indikatornya serta interaksinya yang kompleks, sehingga dapat memajukan usaha pembangunan berkelanjutan di Banyumas.

Penyajian publikasi ini masih jauh dari sempurna mengingat indikator SDG's yang mencapai 241 indikator dan saat ini belum semua indikator tersebut tersedia hingga level kabupaten/kota dalam publikasi ini. Untuk itu kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan publikasi yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan publikasi ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih.

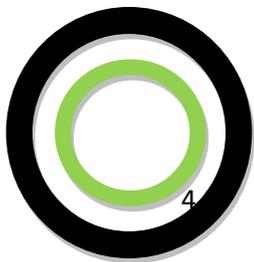
Purwokerto, Desember 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Banyumas

Ir. Suprih Handayani, M.E



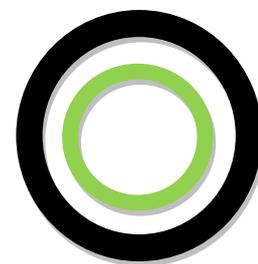
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
I. PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar belakang.....	3
1.2 Tujuan	4
1.3 Ruang Lingkup.....	4
II. KAJIAN LITERATUR	9
2.1 Kerangka kerja CSR oleh CSD, 1996	9
2.2 Kerangka kerja CSR oleh CSD, 2001	11
2.3 Revisi indikator pembangunan berkelanjutan oleh CSD, 2007.....	12
III. METODOLOGI.....	15
3.1 Sumber data.....	15
3.2 Pemilihan indikator	15
3.3 Konsep dan definisi.....	18
IV. INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	23
4.1 Tujuan 1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun	24
4.2 Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.....	34
4.3 Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk.....	37
4.4 Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	40
4.5 Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	46
4.6 Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	48
4.7 Tujuan 7. Menjamin akses energi terjangkau, terjangkau, berkelanjutan, dan modern bagi semua orang	51
4.8 Tujuan 8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang	53



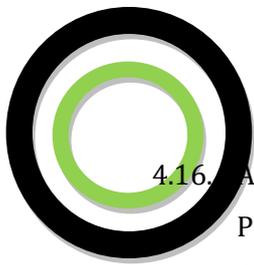
Daftar Isi

4	Tujuan 9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	57
4.10	Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara	63
4.11	Tujuan 11. Membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.....	67
4.12	Tujuan 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	69
4.13	Tujuan 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim	71
4.14	Tujuan 14. Melakukan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut pembangunan yang berkelanjutan, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan.....	73
4.15	Tujuan 15. Melindungi, merestorasi dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, manajemen hutan lestari, mengurangi penggurunan, menghentikan dan mengembalikan	76
4.16	Tujuan 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	78
4.17	Tujuan 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan	81
DAFTAR PUSTAKA.....		91



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1. Kerangka Kerja Penyusunan Indikator Pembangunan Berkelanjutan, 1996	10
2.2. Kerangka Kerja Penyusunan Indikator Pembangunan Berkelanjutan, 2001	11
4.1. Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia, 2021	24
4.2. Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan, 2012-2021	25
4.3. Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan, 2020-2021	26
4.4. Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan di Fasilitas Kesehatan Menurut Karakteristik, 2020-2021.....	27
4.5. Persentase Anak Umur 0-59 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Karakteristik, 2020-2021	28
4.6. Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Sedang Menggunakan Alat Kontrasepsi, 2020-2021	29
4.7. Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Jenis Kloset yang Digunakan Rumah Tangga, 2020-2021.....	30
4.8. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat Menurut Karakteristik, 2020-2021.....	31
4.9. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Sederajat Menurut Karakteristik, 2020-2021	32
4.10. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Sederajat Menurut Karakteristik, 2020-2021	32
4.11. Persentase Penduduk Berusia 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran Menurut Karakteristik, 2020-2021	33
4.12. Persentase Penduduk Berumur 0-23 Bulan (Baduta) yang Pernah Diberi ASI, 2020-2021	35
4.13. Nilai Tambah Dibagi Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Pertanian (Rupiah per Tenaga Kerja), 2015-2021.....	36
4.14. Persentase Perempuan Pernah Kawin Berusia 15-49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Menurut Karakteristik, 2020-2021	38
4.15. Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan Menurut Karakteristik, 2020-2021.....	39



4.16. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Pengeluaran, 2020-2021.....	41
4.17. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Sederajat Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Pengeluaran, 2020-2021	41
4.18. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/Sederajat Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Pengeluaran, 2020-2021.....	42
4.19. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur \geq 15 Tahun, 2010-2021	42
4.20. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-laki di SD/MI/Sederajat, 2017-2021	43
4.21. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-laki di SMP/MTS/Sederajat, 2017-2021.....	44
4.22. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-laki di SMA/MA/Sederajat, 2017-2021	44
4.23. Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk 15 Tahun Ke Atas, 2018-2019	45
4.24. Komposisi Kursi yang Diduduki Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 2019-2021.....	46
4.25. Persentase Individu yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam, 2020-2021.....	47
4.26. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Layak Menurut Karakteristik, 2020-2021.....	49
4.27. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Akses Air Layak Menurut Karakteristik, 2020-2021.....	50
4.28. Rasio Elektrifikasi (Persen), 2016-2019	51
4.29. Konsumsi Listrik Perkapita (MWH/Kapita), 2015-2021	52
4.30. Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita, 2015-2021.....	53
4.31. PDRB ADHK Perkapita (Juta Rupiah), 2015-2021.....	54
4.32. Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja, 2018-2021.....	55
4.33. Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin, 2017-2021.....	56
4.34. Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap PDRB, 2017-2021	58
4.35. Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Perkapita (Juta Rupiah), 2017-2021..	59
4.36. Laju Pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur, 2017-2021.....	59
4.37. Proporsi Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Manufaktur, 2018-2019.....	60
4.38. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas yang Menggunakan/Memiliki Telepon Seluler (HP) Dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2020-2021.....	61

Daftar Gambar



4.39. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas yang Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp) Dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2020-2021.....	62
4.40. Koefisien Gini, 2018-2021.....	63
4.41. Persentase Penduduk Miskin, 2002-2021.....	64
4.42. Persentase Desa Tertinggal, 2018.....	65
4.43. Persentase Desa Mandiri, 2018.....	65
4.44. Banyaknya Nilai Belanja Fungsi Perlindungan Sosial dan Persentase Terhadap Belanja Pemerintah Daerah, 2013-2021.....	66
4.45. Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan, 2016-2021.....	78
4.46. Persentase Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Berjenis Kelamin Perempuan (Persen), 2019-2021.....	79
4.47. Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran Menurut Karakteristik, 2020-2021.....	80
4.48. Proporsi Realisasi Pendapatan Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto, 2018-2021.....	81
4.49. Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDRB, 2018-2021.....	82
4.50. Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun Ke Atas yang Mengakses Internet Selama Tiga Bulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2020-2021.....	83
4.51. Laju Pertumbuhan <i>Year on Year</i> Produk Domestik Regional Bruto (Persen), 2017-2021.....	84
4.52. Persentase Konsumen yang Menjadikan Data dan Informasi Statistik BPS Sebagai Rujukan Utama, 2017-2021.....	85
4.53. Jumlah Pranata Komputer dan Pejabat Fungsional Statistisi Berstatus Aktif di BPS Kabupaten Banyumas 2020-2021.....	86
4.54. Jumlah Pengunjung Website BPS Kabupaten Banyumas, 2017-2021.....	87
4.54. Persentase Konsumen yang Menggunakan Data BPS Dalam Perencanaan Pembangunan, 2017-2021.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

<https://banyumaskab.bps.go.id>





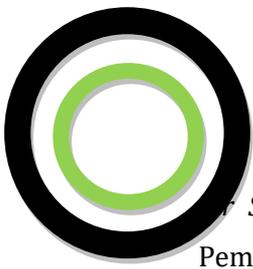
Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Todaro dan Smith (2004) mengatakan dalam Bukunya yang berjudul Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga bahwa Pembangunan (*development*) diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurun waktu yang cukup lama – untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan pendapatan nasional bruto atau GNP (*gross national product*) atau GDP (*gross domestic product*) tahunan pada tingkat, katakanlah 5 persen hingga 7 persen atau bahkan lebih tinggi lagi. Pembangunan ekonomi pada masa lampau juga sering diukur berdasarkan tingkat kemajuan struktur dan penyerapan tenaga kerja (*employment*) yang diupayakan secara terencana. Biasanya dalam proses tersebut peranan sektor pertanian akan menurun untuk memberi kesempatan bagi tampilnya sektor-sektor manufaktur dan jasa-jasa yang senantiasa diupayakan agar terus berkembang. Oleh karena itu, strategi pembangunan biasanya berfokus pada upaya untuk menciptakan industrialisasi sehingga mengorbankan kepentingan pembangunan sektor pertanian dan daerah pedesaan yang pada umumnya sebenarnya memiliki peranan yang sangat penting. Pada akhirnya penerapan tolak ukur pembangunan yang murni bersifat ekonomis tersebut agar lebih akurat dan bermanfaat harus didukung oleh indikator-indikator sosial (*social indicators*) non ekonomi seperti, angka melek huruf, tingkat pendidikan, kondisi dan kualitas pelayanan kesehatan, kecukupan kebutuhan akan perumahan, dan sebagainya.

Sebelum era tahun 1970-an, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja. Tinggi rendahnya kemajuan pembangunan di suatu Negara hanya diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan GNP, baik secara keseluruhan maupun per kapita, yang diyakini akan menetes dengan sendirinya sehingga menciptakan lapangan pekerjaan dan berbagai peluang ekonomi lain yang pada akhirnya akan menumbuhkan berbagai kondisi yang diperlukan demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial secara lebih merata. Hal inilah yang sering dikenal sebagai prinsip “efek penetasan ke bawah” (*trickle down effect*). Dengan demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan unsur paling diutamakan dibandingkan dengan masalah lain seperti kemiskinan, diskriminasi, pengangguran, dan ketimpangan distribusi pendapatan yang seringkali dinomorduakan.

Pada tanggal 2 Agustus 2015, sebanyak 193 negara anggota PBB, termasuk Indonesia, secara aklamasi mengadopsi dokumen berjudul “*Transforming Our World: The 2030 Agenda*



"Sustainable Development" (Mengalihrupakan Dunia Kita: Agenda Tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan). Dokumen ini kemudian disahkan oleh Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan di KTT Pembangunan Berkelanjutan PBB di New York pada 25 – 27 September 2015. Dokumen tersebut terdiri dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dan terbagi menjadi 169 target. *Sustainable Development Goals* (SDG's) merupakan pembaharuan tujuan dan indikator target universal dari Negara anggota PBB yang akan membingkai selama agenda dan kebijakan politik Negara selama 15 tahun ke depan. Pada dasarnya SDG's akan mengikuti dan memperluas pencapaian MDG's yang telah disetujui sejak tahun 2000 yang telah berakhir pada akhir tahun 2015.

Untuk mengukur pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia khususnya di Kabupaten Banyumas yaitu dengan mengevaluasi perkembangan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan. Penyusunan indikator-indikator pembangunan berkelanjutan sebagaimana direkomendasikan oleh Komisi Pembangunan Berkelanjutan penting dilakukan. Oleh karena itu, Badan Pusat Statistik (BPS) telah menelaah indikator-indikator yang mungkin dapat diimplementasikan dengan kondisi Negara Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk publikasi Indikator Pembangunan Berkelanjutan.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan buku publikasi Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah untuk menyajikan data dan informasi mengenai indikator-indikator pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang direkomendasikan oleh Komisi Pembangunan Berkelanjutan PBB. Publikasi ini diharapkan dapat berguna bagi para pengambil keputusan baik tingkat pusat maupun daerah sebagai sumber informasi dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi program pembangunan.

1.3. Ruang Lingkup

Publikasi ini menyajikan data dan informasi terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang meliputi 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu:

- 1) mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun,
- 2) mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi serta mendorong pertanian yang berkelanjutan,
- 3) menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia,



- 4) menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesetaraan belajar seumur hidup bagi semua orang,
- 5) menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan,
- 6) menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang,
- 7) menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang,
- 8) mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang,
- 9) membangun infrastruktur dan berkelanjutan serta membina inovasi,
- 10) mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara,
- 11) menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan,
- 12) menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan,
- 13) mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya,
- 14) melestarikan dan menggunakan samudera, lautam serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan,
- 15) melindungi, memperbaiki, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati,
- 16) mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di seluruh tingkatan, dan
- 17) memperkuat perangkat-perangkat implementasi (*mean of implementation*) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Cakupan data dalam publikasi ini utamanya adalah untuk tingkat Kabupaten Banyumas.

BAB II

KAJIAN LITERATUR

<https://banyumaskab.bps.go.id>





Kajian Literatur

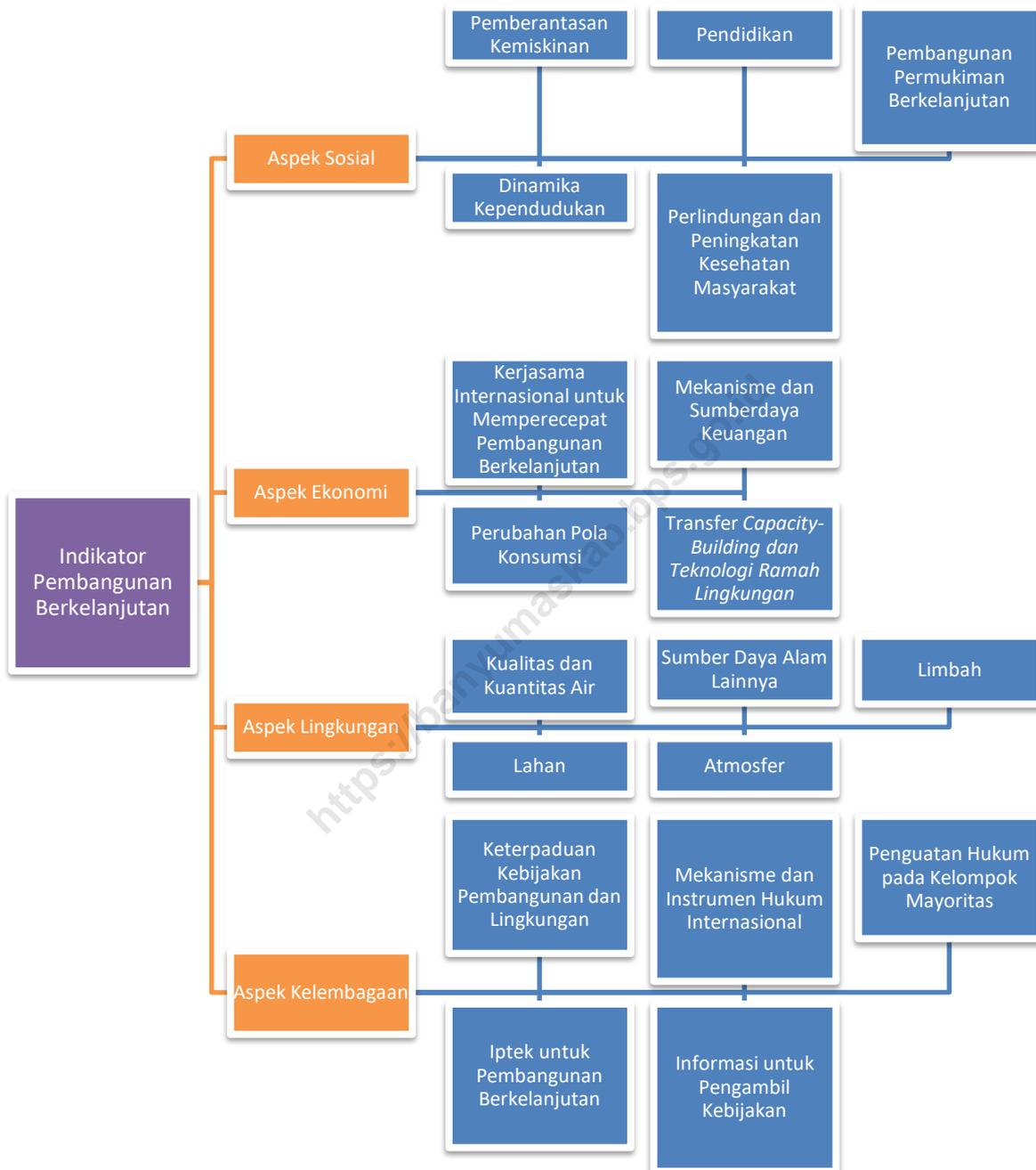
Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang memberikan porsi seimbang pada kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Operasionalisasi konsep pembangunan berkelanjutan memerlukan indikator-indikator untuk menilai efektifitasnya. Dalam banyak kasus di banyak negara, indikator pembangunan berkelanjutan terkait dengan strategi pembangunan yang partisipatif, integratif, lintas sektoral dan komprehensif. Indikator pembangunan berkelanjutan telah dikenal dalam Agenda 21 sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Pada perkembangannya, sekumpulan indikator pembangunan berkelanjutan, termasuk panduan dan metodologinya telah disusun oleh Komisi Pembangunan Berkelanjutan (*Commission on Sustainable Development, CSD*) sejak tahun 1995.

2.1. Kerangka Kerja DSR oleh CSD, 1996

Pada pertemuan yang dilakukan bulan April 1995, Komisi Pembangunan Berkelanjutan menyusun program kerja untuk indikator pembangunan berkelanjutan. Program kerja tersebut terdiri dari 134 indikator yang disusun dalam kerangka kerja *Driving Force-State-Response* (DSR) yang dipublikasikan oleh PBB pada bulan Agustus 1996. Dalam kerangka kerja tersebut, indikator *Driving Force* merepresentasikan aktivitas, proses dan pola-pola manusia yang berdampak pada pembangunan berkelanjutan; indikator *State* menggambarkan kondisi/keadaan dari pembangunan berkelanjutan; dan indikator *Response* menggambarkan pilihan kebijakan dan respon lainnya untuk mengubah kondisi atau keadaan pembangunan berkelanjutan. Kerangka kerja DSR dikelompokkan ke dalam empat aspek yaitu: sosial, ekonomi, lingkungan dan kelembagaan. Kerangka kerja DSR lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Kerangka Kerja Penyusunan Indikator Pembangunan Berkelanjutan, 1996



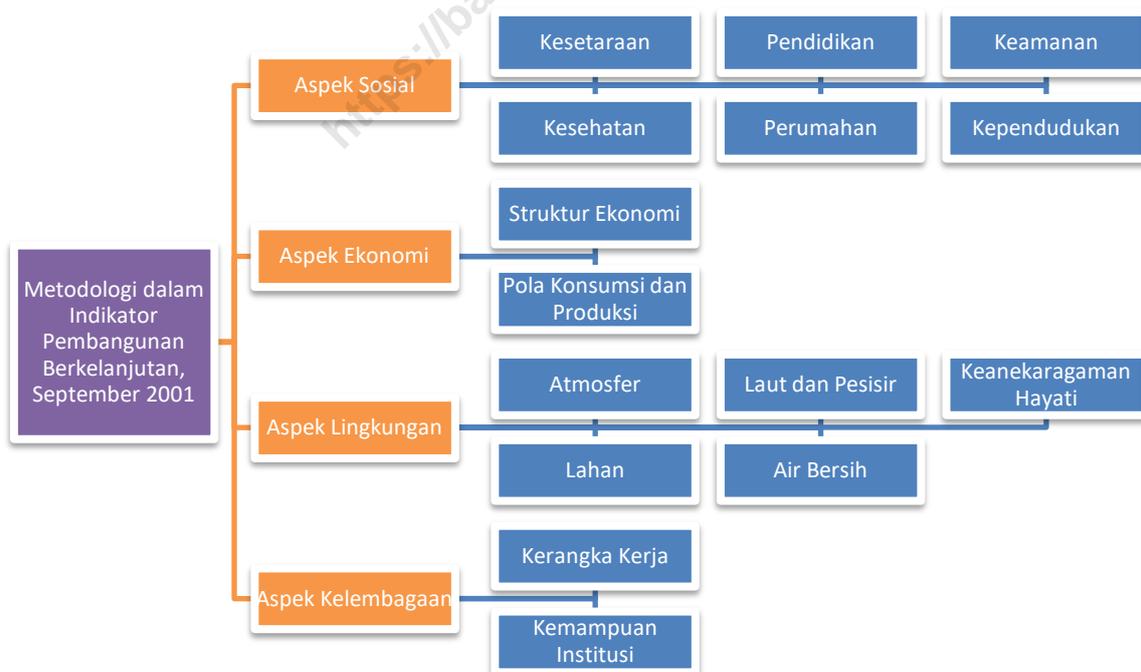
Sumber: Komisi Pembangunan Berkelanjutan PBB



2.2. Kerangka Kerja DSR oleh CSD, 2001

Pada September 2001, CSD telah mempublikasikan laporan terbarunya mengenai indikator pembangunan berkelanjutan yang merupakan hasil evaluasi program kerja selama tahun 1996 – 2000. Hasil laporan tersebut merupakan presentasi akhir yang diharapkan menjadi kerangka kerja dan merupakan indikator-indikator inti (*the core set indicators*) yang disediakan bagi negara anggota dalam mewujudkan usahanya untuk mengukur kemajuan hasil-hasil pembangunan berkelanjutan yang telah dan akan dilaksanakan. Sebagian besar negara anggota yang telah menerapkan indikator pembangunan berkelanjutan CSD menemukan bahwa sekumpulan indikator awal CSD tahun 1996 dianggap masih terlalu banyak sehingga kurang mudah untuk diterapkan. Pada tahun 2001, indikator tersebut direvisi dan dikurangi hingga tersisa sebanyak 58 indikator. Indikator tersebut tertuang dalam kerangka kebijakan yang berorientasi tema dan sub tema, dan telah disesuaikan dengan implementasi dari Agenda 21. Sebenarnya indikator pokok hasil evaluasi CSD ini merupakan indikator pilihan dari indikator pembangunan berkelanjutan yang dipublikasikan pada tahun 1996, yang berjumlah sekitar 134 indikator.

Gambar 2.2. Kerangka Kerja Penyusunan Indikator Pembangunan Berkelanjutan, 2001



Sumber: Komisi Pembangunan Berkelanjutan PBB



2.3. Revisi Indikator Pembangunan Berkelanjutan oleh CSD, 2007

Pada tahun 2005, Divisi Pembangunan Berkelanjutan PBB mulai meninjau kembali indikator pembangunan berkelanjutan. Peninjauan ulang ini sebagian besar didasarkan pada dua alasan, yaitu sudah banyak Negara yang menerapkan indikator pembangunan berkelanjutan. Bahkan mereka sudah mulai mengembangkan indikator pembangunan berkelanjutan nasional mereka sendiri, namun tetap berdasarkan pada indikator pembangunan berkelanjutan CSD. Selain itu, sejak diadopsinya deklarasi milenium oleh PBB tahun 2000, banyak perhatian diberikan oleh PBB dan negara–Negara anggota demi pengembangan dan penggunaan indikator untuk mengukur kemajuan dalam mencapai MDGs.

Peninjauan kembali indikator pembangunan berkelanjutan CSD dilakukan dengan bantuan dari para ahli dan pengalaman Negara Negara yang telah menerapkan indikator pembangunan berkelanjutan. Hasil peninjauan kembali pada indikator-indikator pembangunan berkelanjutan CSD, telah menghasilkan 50 indikator utama. Indikator utama ini merupakan bagian dari 96 indikator pembangunan berkelanjutan hasil revisi. Divisi Pembangunan Berkelanjutan telah memastikan koherensi indikator CSD hasil revisi dengan indikator lain seperti MDGs, *the 2010 Biodiversity Indicators Partnership*, *the Hyogo Framework for Action on Disaster Reduction*, *the Global Forest Resource Assessment*, dan *Sustainable Tourism Indicators*. Pemilihan indikator utama membantu negara–negara untuk bisa memilih indikator yang sesuai dengan kondisi masing-masing negara. Sementara kumpulan indikator yang lebih besar memungkinkan dimasukkannya indikator tambahan sehingga masing-masing negara dapat melakukan penilaian yang lebih komprehensif terhadap indikator pembangunan berkelanjutan.

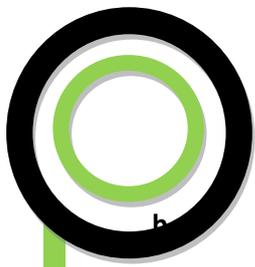
Indikator utama ini memenuhi 3 kriteria, yaitu pertama indikator mencakup isu yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan di sebagian besar negara. Kedua, indikator ini memberikan informasi penting yang tidak tersedia dari indikator inti lainnya dan ketiga, indikator ini dapat dihitung oleh sebagian besar negara dengan data yang tersedia ataupun dapat dihitung dengan waktu dan biaya yang memungkinkan. Sebaliknya, indikator yang bukan bagian dari indikator utama hanya relevan untuk sebagian kecil negara dan bisa digunakan sebagai informasi pelengkap untuk indikator utama atau tidak mudah tersedia untuk sebagian besar negara. Sekumpulan indikator ini tetap mempertahankan kerangka tematik/sub-tematik yang diadopsi pada tahun 2001. Dengan demikian, tetap konsisten dengan praktek kebanyakan negara yang menerapkan sekumpulan indikator pembangunan berkelanjutan nasional. Indikator pembangunan berkelanjutan CSD yang di revisi terdiri dari 14 tema, 44 sub-tema, 50 indikator utama, dan 46 indikator lain.

BAB III

METODOLOGI

<https://banyumaskab.bps.go.id>





Metodologi

3.1. Sumber Data

Dalam publikasi ini, indikator-indikator yang disajikan sebagian besar berasal dari hasil survei/sensus yang dilakukan BPS dan data dari publikasi Banyumas dalam angka tahun 2020-2021.

3.2. Pemilihan Indikator

Berikut merupakan penjelasan setiap indikator terpilih dari kerangka kerja CSD yang sudah disesuaikan dengan kondisi di Banyumas:

1. Jumlah dan persentase penduduk miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan berada di bawah garis kemiskinan. Tujuan dari ukuran kemiskinan adalah untuk memungkinkan adanya perbandingan kemiskinan dan menilai kemajuan upaya pengentasan kemiskinan serta evaluasi program.

2. Persentase penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan

3. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan

4. Persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin dan menggunakan alat kontrasepsi

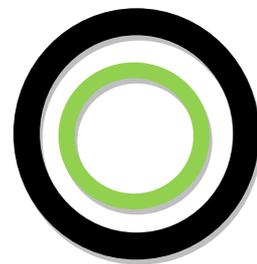
Indikator ini menunjukkan usaha manusia secara sadar dalam mengontrol kelahiran/pelayanan kesehatan reproduksi. Meskipun indikator ini tidak dapat mengontrol semua tindakan yang diambil dalam mengontrol kelahiran. Manfaat kesehatan dari penggunaan kontrasepsi meliputi kemampuan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga mengurangi resiko aborsi, potensi komplikasi kehamilan dan resiko kematian ibu.

5. Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak menurut karakteristik



Indikator ini memonitor kemajuan dari akses rumah tangga terhadap sumber air bersih dengan volume yang memadai dan jarak yang terjangkau.

6. Persentase rumah tangga menurut karakteristik dan jenis kloset yang digunakan rumah tangga
7. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat
8. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Sederajat
9. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Sederajat
10. Persentase penduduk berusia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran
11. Persentase rumah tangga menurut sumber penerangan utama
Listrik dan layanan energi modern adalah komponen penting dalam penyediaan pelayanan sosial dasar. Kurangnya akses ke layanan energi modern berkontribusi terhadap kemiskinan dan membatasi pembangunan ekonomi.
12. Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian
13. Persentase perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
14. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas Kesehatan
15. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat
16. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Sederajat
17. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/Sederajat
18. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur ≥ 15 tahun
19. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-laki di SD/MI/Sederajat
Angka Partisipasi Murni SD merupakan proporsi penduduk usia SD yang bersekolah di SD terhadap penduduk usia SD di suatu wilayah. Tujuan angka partisipasi murni memberikan ukuran tentang penduduk yang menurut peraturan sudah pantas/harus bersekolah untuk bersekolah di pendidikan dasar. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur jumlah penduduk usia sekolah dasar yang tidak bersekolah di sekolah dasar.
20. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-laki di SMP/MTS/Sederajat
21. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-laki di SMA/MA/Sederajat
22. Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun Ke Atas
23. Komposisi kursi yang diduduki perempuan di DPRD
24. Persentase individu yang menggunakan telepon genggam
25. Persentase rumah tangga menurut sumber air minum layak
26. Rasio elektrifikasi
27. Konsumsi listrik perkapita



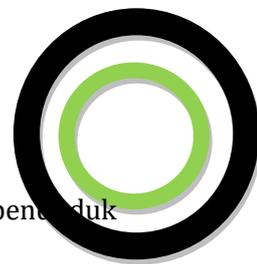
28. Laju pertumbuhan PDRB perkapita
29. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Perkapita
30. Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja
31. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin
32. Jumlah bandara
33. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB
34. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur perkapita
35. Laju pertumbuhan PDRB industry manufaktur
36. Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur
37. Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam
38. Proporsi individu yang menggunakan internet
39. Koefisien gini
40. Persentase penduduk miskin
41. Jumlah desa tertinggal
42. Jumlah desa mandiri
43. Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat
44. Persentase keterwakilan perempuan di DPRD
45. Persentase penduduk berumur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran
46. Proporsi realisasi pendapatan pemerintah terhadap PDRB
47. Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB
48. Proporsi individu yang menggunakan internet
49. Laju pertumbuhan *year on year* PDRB
50. Persentase konsumen yang menjadikan data informasi statistik BPS sebagai rujukan utama
51. Jumlah pranata komputer dan pejabat fungsional statistisi berstatus aktif di BPS Kabupaten Banyumas
52. Jumlah pengunjung website BPS Kabupaten Banyumas
53. Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan pembangunan
54. Distribusi pembagian pengeluaran per kapita dan indeks gini
55. Persentase rumah tangga dengan penampungan akhir tinja tangki septik



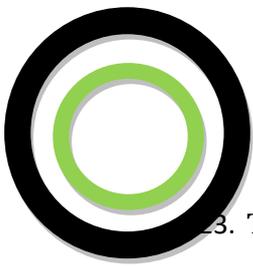
3.3. Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi yang digunakan dalam publikasi berasal dari BPS dan instansi lain.

1. Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang, saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah.
2. Lahan pertanian bukan sawah adalah semua lahan pertanian selain lahan sawah. Lahan pertanian bukan sawah yang disajikan dalam publikasi ini terdiri dari tegal/kebun, ladang/ huma, dan lahan yang sementara tidak diusahakan.
3. Pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.
4. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut zooxanthellae.
5. Bencana alam adalah bencana yang ditimbulkan oleh alam, misalnya banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus dan lain-lain.
6. Sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih dan sebagainya.
7. Penduduk adalah semua orang yang berdomosili di wilayah teritorial Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomosili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.
8. Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan dalam persentase.
9. Angka beban ketergantungan adalah perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) dikalikan 100.
10. Angka kelahiran total adalah rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita selama masa reproduksi dengan anggapan bahwa perilaku kelahirannya mengikuti pola kelahiran tertentu tanpa memperhitungkan angka kelangsungan hidup wanita.



11. Angka harapan hidup saat lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.
12. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia dibawah 1 tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu.
13. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
14. Indeks gini adalah ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai koefisien gini terletak antara nol yang mencerminkan pemerataan sempurna dan satu yang menggambarkan ketidakmerataan sempurna.
15. Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bias membaca dan menulis sebuah kalimat sederhana.
16. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.
17. Bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam usaha/kegiatan ekonomi).
18. Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam unit usaha/kegiatan dalam melakukan pekerjaan.
19. Pekerja tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu usaha untuk memperoleh penghasilan/keuntungan yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga, kerabat, atau tetangga tanpa mendapat upah/gaji.
20. Upah buruh adalah pendapatan yang diterima buruh dalam bentuk uang, yang mencakup bukan hanya komponen upah/gaji, tetapi juga lembur dan tunjangan-tunjangan yang diterima secara rutin/reguler (tunjangan transport, uang makan dan tunjangan lainnya sejauh diterima dalam bentuk uang), tidak termasuk Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan bersifat tahunan, kwartalan, tunjangan-tunjangan lain yang bersifat tidak rutin dan unjangan dalam bentuk natura.
21. Pekerja yang rentan kehilangan pekerjaannya adalah pekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap dan atau buruh tidak dibayar, dan pekerja tak dibayar.
22. Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi/ kabupaten/kota) adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam suatu wilayah dalam satu tahun tertentu atau output produksi yang ada dalam wilayah.



23. Tabungan bruto dalam neraca nasional didefinisikan sebagai *disposable income* atau pendapatan yang siap dibelanjakan dan dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi.
24. Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal.
25. Inflasi adalah indikator yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.
26. Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang diperkayakan kepada mereka.
27. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun yang tidak melawan hukum.
28. Bunuh diri adalah tindakan mengakhiri hidup sendiri tanpa bantuan aktif orang lain. Alasan atau motif bunuh diri bermacam-macam, namun biasanya didasari oleh rasa bersalah yang sangat besar, karena merasa gagal untuk mencapai sesuatu harapan.

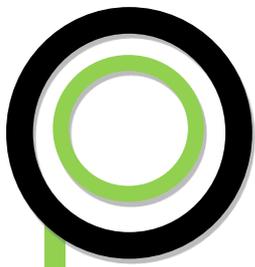
BAB IV



INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

<https://banyumaskab.bps.go.id/>





Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan diantara dimensi pembangunan yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Dimana dalam proses pembangunan tersebut memiliki prinsip memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Unsur-unsur pendukung yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, dan teknologi harus bersinergi agar tidak terjadi ketimpangan antar dimensinya yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan berarti merupakan pembangunan yang dapat berlangsung secara terus menerus dan konsisten dengan menjaga kualitas hidup (*well being*) masyarakat dengan tidak merusak lingkungan dan mempertimbangkan cadangan sumberdaya yang ada untuk kebutuhan masa depan.

Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk mensejahterakan manusia dan planet bumi yang diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2015 menggantikan program sebelumnya yaitu Millenium Development Goals (MDG's) sebagai tujuan utama pembangunan bersama hingga tahun 2030. Rencana pembangunan ini disepakati oleh berbagai negara dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berbeda dengan MDGs yang hanya memiliki 8 tujuan, SDGs mempunyai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target dan 241 indikator. Oleh karena itu SDG's memiliki cakupan yang lebih luas dan akan mampu lebih tanggap atas penyebab utama kemiskinan serta kebutuhan universal. Tujuan serta target dari pembangunan berkelanjutan ini akan selalu dimonitor dan ditinjau dengan menggunakan indikator-indikator global.

Penentuan indikator pembangunan berkelanjutan bagi suatu negara menjadi sangat penting untuk mengukur sejauh mana pembangunan yang dilaksanakan telah berhasil. Penyusunan indikator ini mempertimbangkan diantaranya indikator akhir harus sederhana; mencakup seluruh aktifitas manusia yang terkait dengan ekonomi dan lingkungan; dapat diukur dan menunjukkan kecenderungan; sensitif terhadap perubahan karakteristik lingkungan dan batas waktu yaitu frekuensi dan lingkup elemen dapat menunjukkan identifikasi waktu dari kecenderungan yang ada. Berikut dijabarkan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan diklasifikasikan menurut tujuan SDGs.



TUJUAN 1

MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN DIMANAPUN



Tujuan 1 pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun. Dalam rangka mencapai tujuan tanpa kemiskinan pada tahun 2030, seluruh *stakeholder* baik pemerintah maupun non pemerintah berupaya menjalankan berbagai kebijakan, program dan kegiatan. Target yang ingin dicapai selama 15 tahun ke depan terdiri dari pemberantasan kemiskinan, penerapan perlindungan sosial, pemenuhan pelayanan dasar, mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana, serta penguatan kebijakan dan mobilisasi berbagai sumber daya untuk mengakhiri kemiskinan.

TARGET 1.1. PADA TAHUN 2030, MENGENTASKAN KEMISKINAN EKSTRIM BAGI SEMUA ORANG YANG SAAT INI BERPENDAPATAN KURANG DARI 1,90 DOLAR AMERIKA PER HARI

INDIKATOR 1.2.1. TINGKAT KEMISKINAN EKSTRIM

Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan internasional yakni dibawah \$ 1,9 per hari di Kabupaten Banyumas tercatat sebesar 6,83 persen (persentase penduduk miskin ekstrim), Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,38 persen dan Indonesia sebesar 4 persen. Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin ekstrim di Banyumas sebanyak 116.330 jiwa, di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1.527.603 jiwa dan di Indonesia sebanyak 10.865.279 jiwa.

GAMBAR 4.1. TINGKAT KEMISKINAN EKSTRIM KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH DAN INDONESIA TAHUN 2021



Sumber: Susenas (diolah)



Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TARGET 1.2. PADA TAHUN 2030, MENGURANGI SETIDAKNYA SETENGAH PROPORSI LAKI-LAKI, PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK DARI SEMUA USIA YANG HIDUP DALAM KEMISKINAN DI SEMUA JENIS SESUAI DENGAN DEFINISI NASIONAL

INDIKATOR 1.2.1. PROPORSI PENDUDUK YANG HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN NASIONAL MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR

GAMBAR 4.2. PROPORSI PENDUDUK YANG HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN, 2012 – 2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional - BPS

Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yakni mereka yang rata-rata konsumsi hariannya (atau pendapatan) kurang dari jumlah tertentu per orang per bulan. Pengukuran kemiskinan di Indonesia menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Pembangunan yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah dalam sepuluh tahun terakhir telah menunjukkan hasil yang positif. Terlihat bahwa proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tahun 2012 sebesar 19,44 persen dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2019 sebesar 12,53 persen dan kembali meningkat pada tahun 2020 dan 2021. Capaian angka kemiskinan pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan angka kemiskinan akibat adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan pergerakan

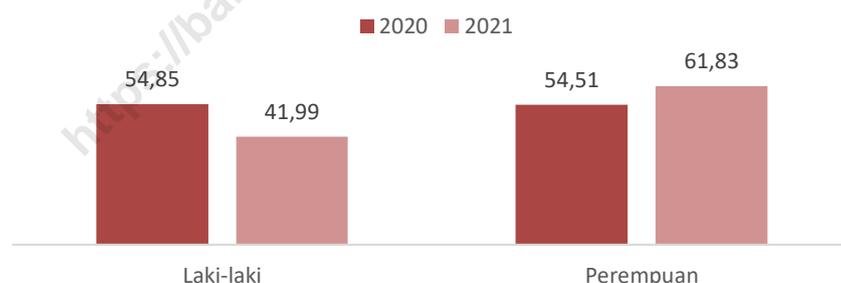


roda perekonomian mengalami kontraksi. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyumas tahun 2021 mencapai 232,91 ribu jiwa.

TARGET 1.3. MENERAPKAN SECARA NASIONAL SISTEM DAN UPAYA PERLINDUNGAN SOSIAL YANG TEPAT BAGI SEMUA TERMASUK KELOMPOK YANG PALING MISKIN DAN PADA TAHUN 2030 MENCAPAI CAKUPAN SUBSTANSIAL BAGI KELOMPOK MISKIN DAN RENTAN

INDIKATOR 1.3.1. PROPORSI PENDUDUK PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) MELALUI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)

GAMBAR 4.3. PERSENTASE PENDUDUK YANG MENGGUNAKAN JAMINAN KESEHATAN UNTUK BEROBAT JALAN, 2020-2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020-2021

Pada tahun 2021 terjadi peningkatan persentase penduduk perempuan yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan di Kabupaten Banyumas. Jika dibandingkan dengan penduduk laki-laki, persentase penduduk perempuan yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan lebih banyak yakni hampir 62 persen.

Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan dalam UU system jaminan sosial nasional yang iurannya dibayar oleh pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan. Indikator ini merupakan indikator nasional sebagai proksi indikator global.



Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TARGET 1.4. PADA TAHUN 2030, MENJAMIN BAHWA SEMUA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN, KHUSUSNYA MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN, MEMILIKI HAK YANG SAMA TERHADAP SUMBER DAYA EKONOMI, SERTA AKSES TERHADAP PELAYANAN DASAR, KEPEMILIKAN KONTROL ATAS TANAH

INDIKATOR 1.4.1.(A) PERSENTASE PEREMPUAN PERNAH KAWIN UMUR 15-49 TAHUN YANG PROSES MELAHIRKAN TERAKHIRNYA DI FASILITAS KESEHATAN

Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan adalah perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan di fasilitas kesehatan dibandingkan dengan total keseluruhan jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan dinyatakan dengan persentase. Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit/rumah sakit bersalin, klinik/bidan/praktek dokter, puskesmas/pustu/polindes.

GAMBAR 4.4. PERSENTASE PEREMPUAN PERNAH KAWIN BERUMUR 15-49 TAHUN YANG PERNAH MELAHIRKAN DI FASILITAS KESEHATAN MENURUT KARAKTERISTIK, 2020-2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020-2021

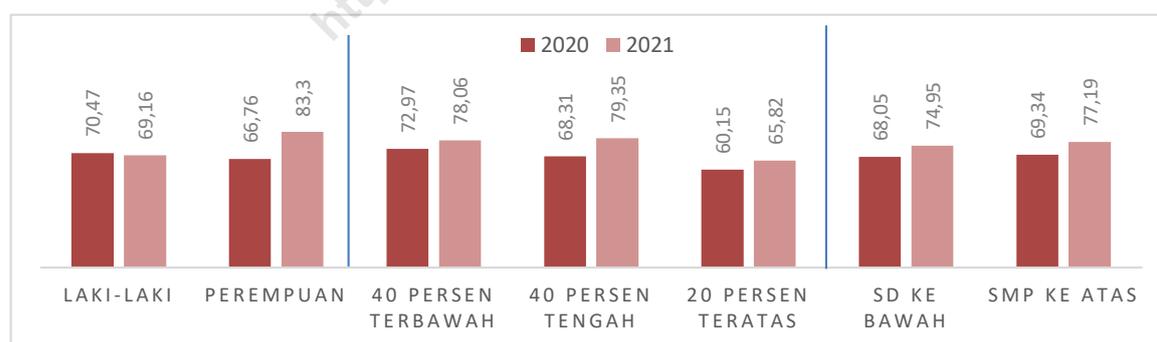
Persentase perempuan pernah kawin yang berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan di fasilitas kesehatan tahun 2020 sebanyak 99,02 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 99,03 persen. Adapun sisanya yakni 0,97 persen perempuan berumur 15-49 tahun melahirkan tidak di fasilitas kesehatan. Hal ini dapat disebabkan karena faktor ketidaksengajaan dimana ibu hamil melahirkan saat di perjalanan menuju fasilitas kesehatan.



Gambar 4.3 menunjukkan persentase perempuan berumur 15-49 tahun pernah kawin yang melahirkan di fasilitas kesehatan tahun 2020 dan 2021 menurut karakteristik kelompok pengeluaran dan pendidikan tertinggi kepala rumah tangga. Menurut karakteristik kelompok pengeluaran, perempuan pernah kawin berumur 15-49 tahun pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang melahirkan di fasilitas kesehatan tahun 2020 sebanyak 97,3 persen dan pada tahun 2021 sebesar 97,83 persen, artinya masih ada perempuan yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan. Sedangkan menurut karakteristik pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, sebanyak 98,93 persen perempuan berumur 15-49 tahun dengan pendidikan tertinggi kepala rumah tangga SMP ke atas sebanyak 98,83 persen yang menggunakan fasilitas kesehatan untuk melahirkan pada tahun 2020 sedangkan sebesar 98,75 persen yang menggunakan fasilitas kesehatan pada tahun 2021.

INDIKATOR 1.4.1.(B) PERSENTASE ANAK UMUR 12-23 BULAN YANG MENERIMA IMUNISASI DASAR LENGKAP

GAMBAR 4.5. PERSENTASE ANAK UMUR 0-59 BULAN YANG MENERIMA IMUNISASI DASAR LENGKAP MENURUT KARAKTERISTIK, 2020-2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020-2021

Persentase anak umur 0-59 bulan yang menerima imunisasi lengkap pada tahun 2020 sebanyak 68,67 persen dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 76,07 persen. Jika dilihat menurut karakteristik jenis kelamin, anak perempuan yang berumur 0-59 bulan yang mengalami peningkatan penerimaan imunisasi dasar lengkap pada tahun 2021 dibandingkan 2020. Capaian anak perempuan yang menerima imunisasi dasar lengkap tahun 2021 sebesar 83,3 persen. Jika dilihat menurut karakteristik kelompok pengeluaran, anak umur 0-59 bulan yang mengalami



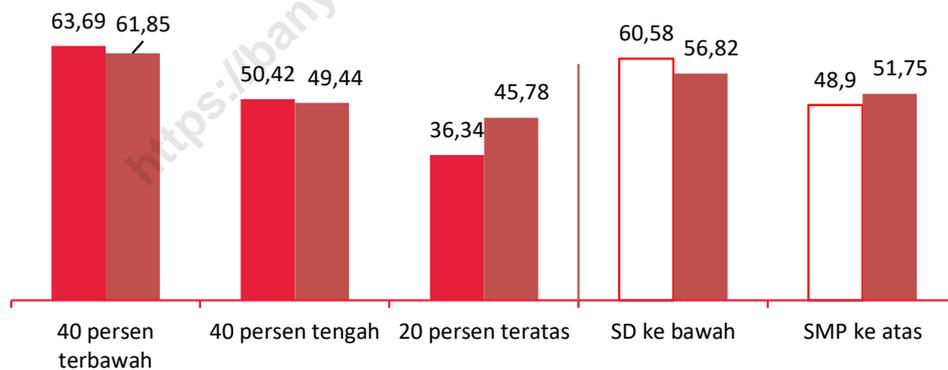
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

peningkatan penerima imunisasi dasar yakni pada kelompok pengeluaran 40 persen tengah yakni dari 68,31 persen menjadi 79,35 persen.

INDIKATOR 1.4.1.(C) ANGKA PEMAKAIAN KONTRASEPSI PASANGAN USIA SUBUR (15-49 TAHUN) YANG PERNAH KAWIN

Keluarga Berencana (KB) merupakan program yang memiliki kontribusi penting dalam upaya meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian fertilitas yang mampu menekan laju pertumbuhan penduduk. Dalam menjalankan program keluarga berencana, pemerintah memiliki peran yang cukup strategis baik dalam menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat serta memberikan pelayanan keluarga berencana yang aman bermutu dan terjangkau oleh masyarakat.

GAMBAR 4.6. PERSENTASE PEREMPUAN BERUMUR 15-49 TAHUN YANG PERNAH KAWIN DAN SEDANG MENGGUNAKAN ALAT KONTRASEPSI, 2020-2021



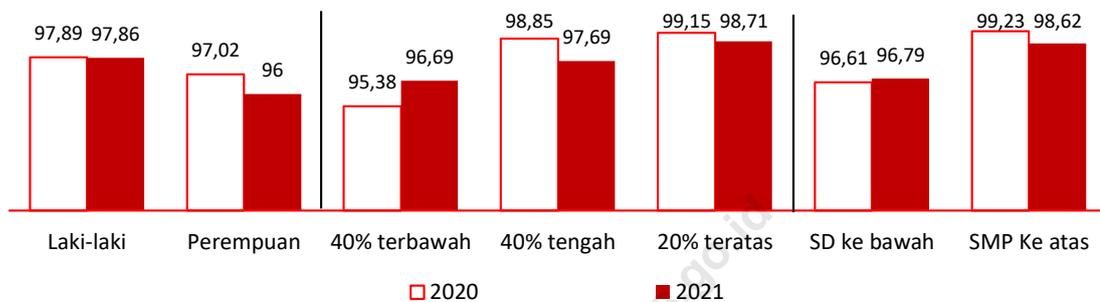
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020-2021

Persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin dan sedang menggunakan alat kontrasepsi tahun 2020 sebanyak 52,78 persen dan meningkat menjadi 53,55 persen pada tahun 2021. Jika dilihat menurut karakteristik kelompok pengeluaran, yang mengalami kenaikan dalam penggunaan alat kontrasepsi yakni kategori pengeluaran 20 persen teratas dari 36,34 persen menjadi 45,78 persen. Sedangkan jika dilihat menurut karakteristik pendidikan tertinggi kepala rumah tangga yang mengalami kenaikan yakni kepala rumah tangga dengan pendidikan SMP ke atas yakni dari 48,9 persen pada tahun 2020 menjadi 51,75 persen pada tahun 2021.



INDIKATOR 1.4.1.(E) PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN SANITASI LAYAK DAN BERKELANJUTAN

GAMBAR 4.7. PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT KARAKTERISTIK DAN JENIS KLOSET YANG DIGUNAKAN RUMAH TANGGA, 2020-2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020-2021

Sanitasi layak dapat didefinisikan sebagai penggunaan kloset leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tangki septik atau SPAL, dan digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan di Kabupaten Banyumas sudah cukup banyak yang menggunakan kloset leher angsa yakni 97,60 persen pada tahun 2021. Sisanya sebanyak 2,40 persen rumah tangga masih menggunakan plengsengan dengan tutup, plengsengan tanpa tutup dan cubluk/cemplung. Gambar 4.6 menunjukkan bahwa rumah tangga yang menggunakan kloset leher angsa hampir merata di semua karakteristik baik menurut jenis kelamin kepala rumah tangga (laki-laki dan perempuan), kelompok pengeluaran (40% terbawah, 40% tengah dan 20% teratas) dan menurut pendidikan tertinggi kepala rumah tangga (SD ke bawah dan SMP ke atas).



Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

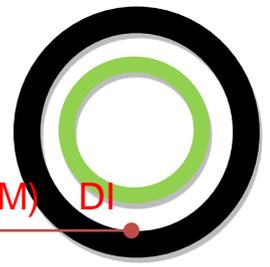
INDIKATOR 1.4.1.(F) ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) DI SD/MI/SEDERAJAT

GAMBAR 4.8. ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SD/MI/SEDERAJAT MENURUT KARAKTERISTIK, 2020-2021



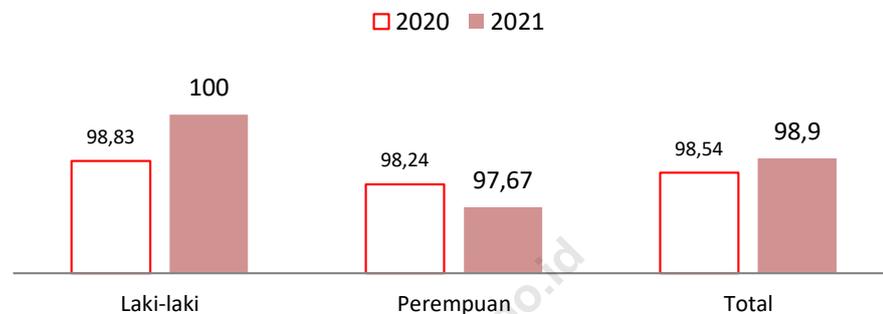
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020-2021

Angka Partisipasi Murni (APM) SD menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah (7-12 tahun) yang bersekolah di SD/MI/ sederajat. APM SD ini selain menunjukkan bagaimana partisipasi sekolah di tingkat SD yang bersekolah tepat waktu juga digunakan untuk melihat pemerataan dan perluasan akses pendidikan pada jenjang SD. Salah satu indikator SDGs yang digunakan adalah APM SD/MI/ sederajat, indikator ini mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Tampak pada Gambar 4.7 nilai APM SD/MI/ Sederajat Kabupaten Banyumas menurut jenis kelamin laki-laki sebesar 100 persen dan perempuan sebesar 97,67 persen. Secara total, APM SD di Kabupaten Banyumas tahun 2021 sebesar 98,90 persen.



INDIKATOR 1.4.1.(H) ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) DI SMP/MTS/SEDERAJAT

GAMBAR 4.9. ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SMP/MTS/SEDERAJAT MENURUT KARAKTERISTIK, 2020-2021

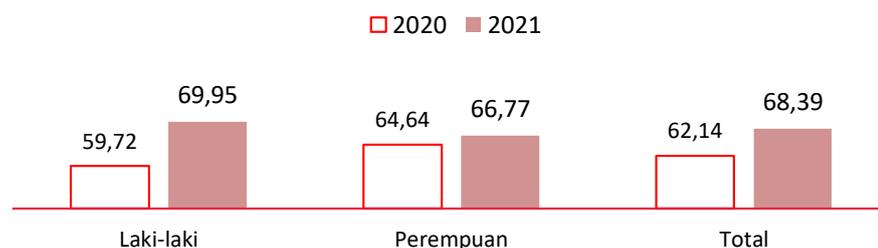


Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020-2021

Sama halnya dengan APM SD, APM SMP/MTs/ Sederajat digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah jenjang SMP. Namun capaian APM SMP Kabupaten Banyumas masih di bawah capaian APM SD. Gambar 4.8 menunjukkan bahwa seluruh anak laki-laki usia sekolah jenjang SMP/MTs/Sederajat tahun 2021 di Kabupaten Banyumas dapat bersekolah tepat waktu sedangkan APM SMP/MTs/Sederajat anak perempuan sebesar 97,67 persen. Jika dilihat secara menyeluruh, nilai APM SMP/MTs/Sederajat di Kabupaten Banyumas tahun 2021 sebesar 98,9 persen.

INDIKATOR 1.4.1.(I) ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) DI SMA/MA/SEDERAJAT

GAMBAR 4.10. ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SMA/MA/SEDERAJAT MENURUT KARAKTERISTIK, 2020-2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020-2021

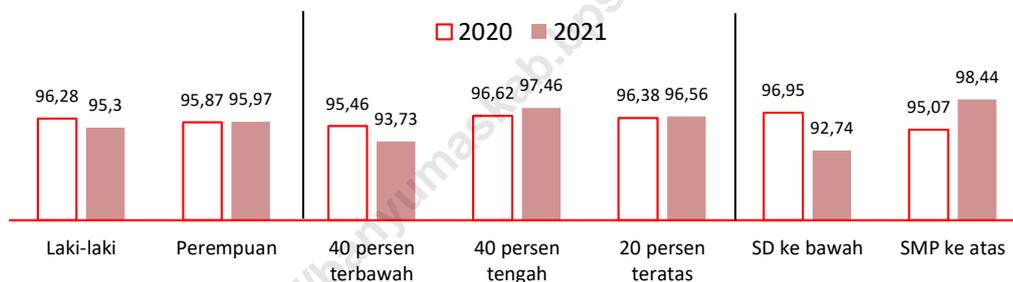


Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

APM SMA juga digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah jenjang SMA. Gambar 4.9 menunjukkan bahwa APM SMA tahun 2021 mengalami kenaikan dari 62,14 menjadi 68,39. APM SMA jenis kelamin laki-laki masih berada pada angka 69,95 persen sedangkan APM SMA perempuan sebesar 66,77 persen yang artinya sepertiga dari penduduk laki-laki dan perempuan usia sekolah jenjang SMA masih belum dapat bersekolah tepat waktu.

INDIKATOR 1.4.1.(J) PERSENTASE PENDUDUK USIA 0-17 TAHUN DENGAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN

GAMBAR 4.11. PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 0-17 TAHUN YANG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN MENURUT KARAKTERISTIK, 2020-2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020-2021

Persentase penduduk berusia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran tahun 2021 sebanyak 95,63 persen. Jika dirinci menurut jenis kelamin, penduduk umur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran berjenis kelamin laki-laki sebanyak 95,3 persen, sedangkan penduduk perempuan berumur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran sebesar 95,97 persen. Jika dilihat menurut karakteristik pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, penduduk berumur 0-17 tahun dengan pendidikan kepala rumah tangga SMP ke atas sebesar 98,44 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Banyumas akan tertib administrasi sudah cukup tinggi.



TUJUAN 2

MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN



Percepatan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan produktivitas pertanian telah menurunkan jumlah kelaparan dan kurang gizi. Namun kelaparan dan kurang gizi tetap menjadi permasalahan utama dalam pembangunan di banyak Negara. Tujuan 2 pada SDGs mengupayakan untuk menghilangkan semua bentuk kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan pada tahun 2030. Tujuan ini memastikan setiap warga Negara memiliki kesempatan dan akses yang sama dalam memperoleh makanan yang berkualitas, sehingga dapat terbebas dari kelaparan, memperoleh ketahanan pangan dan gizi yang baik dan berkelanjutan serta meningkatkan taraf hidup.

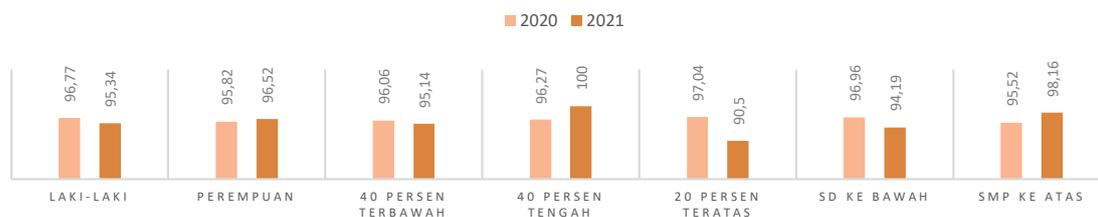
TARGET 2.2. PADA TAHUN 2030, MENGHILANGKAN SEGALA BENTUK KEKURANGAN GIZI, TERMASUK PADA TAHUN 2025 MENCAPAI TARGET YANG DISEPAKATI SECARA INTERNASIONAL UNTUK ANAK PENDEK DAN KURUS DI BAWAH USIA 5 TAHUN, DAN MEMENUHI KEBUTUHAN GIZI REMAJA PEREMPUAN, IBU HAMIL DAN MENYUSUI, SERTA MANULA

INDIKATOR 2.2.2. (B) PERSENTASE BAYI USIA KURANG DARI 6 BULAN YANG MENDAPATKAN ASI EKSKLUSIF



Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

GAMBAR 4.12. PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 0-23 BULAN (BADUTA) YANG PERNAH DIBERI ASI, 2020-2021



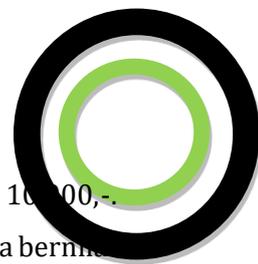
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020-2021

Hasil Susenas tahun 2021 menunjukkan bahwa persentase baduta yang pernah diberi ASI sebesar 95,89 persen. Jika di rinci menurut karakteristik jenis kelamin kepala rumah tangga, kelompok pengeluaran dan pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, angka persentase baduta yang pernah diberi ASI tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Capaian yang menonjol adalah pada kelompok pengeluaran 40 persen tengah, seluruh (100 persen) baduta telah diberi ASI. Capaian persentase baduta yang pernah diberi ASI cukup tinggi namun perlu ditelaah lagi seberapa banyak bayi yang usianya kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif.

TARGET 2.3. PADA TAHUN 2030, MENGGANDAKAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN DAN PENDAPATAN PRODUSEN MAKANAN SKALA KECIL, KHUSUSNYA PEREMPUAN, MASYARAKAT PENDUDUK ASLI, KELUARGA PETANI, PENGGEMBALA DAN NELAYAN, TERMASUK MELALUI AKSES YANG AMAN DAN SAMA TERHADAP LAHAN, SUMBER DAYA PRODUKTIF, DAN INPUT LAINNYA, PENGETAHUAN, JASA KEUANGAN, PASAR, DAN PELUANG NILAI TAMBAH, DAN PEKERJAAN NON-PERTANIAN

INDIKATOR 2.3.1. NILAI TAMBAH PERTANIAN DIBAGI JUMLAH TENAGA KERJA DI SEKTOR PERTANIAN (RUPIAH PER TENAGA KERJA)

Nilai tambah (*value added*) secara sederhana dapat diartikan sebagai bertambahnya nilai suatu barang atau jasa akibat dari pengolahan, penyimpanan atau proses lainnya. Nilai tambah



dapat dicontohkan misalnya kita menjual kentang sebanyak 1 kg dengan harga Rp 10.000,-. Tetapi bila kentang tersebut kita jadikan keripik kentang maka 1 kg kentang tersebut bisa bernilai misalnya Rp 15.000,-. Dari contoh maka ada nilai tambah yang terjadi pada kentang karena telah diolah menjadi keripik kentang.

Prinsip sederhana nilai tambah kentang tersebut bila dianalogikan pada sektor pertanian, kondisi sektor pertanian saat ini masih belum menggembirakan, ini terlihat dari masih banyak produk-produk pertanian yang diekspor masih dalam keadaan mentah, seperti misalnya kelapa sawit yang masih banyak di ekspor dalam bentuk *Crude Palm Oil* (CPO) tanpa adanya pengolahan di dalam negeri terlebih dahulu. Padahal dengan melakukan pengolahan terhadap produk-produk pertanian tersebut maka akan meningkatkan nilai tambah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang besar tentu saja berdampak bagi pendapatan masyarakat yang muara akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

GAMBAR 4.13. NILAI TAMBAH PERTANIAN DIBAGI JUMLAH TENAGA KERJA DI SEKTOR PERTANIAN (JUTA RUPIAH PER TENAGA KERJA), 2015- 2021



Sumber: Publikasi PDRB dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2015-2021

Dari Gambar 4.13, terlihat bahwa nilai tambah pertanian per tenaga kerja Kabupaten Banyumas mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2015-2021. Meskipun mengalami fluktuasi namun tidak signifikan, hal ini menunjukkan pola produktivitas yang hampir sama setiap tahun atau belum ada program pemerintah yang mampu meningkatkan produktivitas sektor pertanian secara drastis. Indikator nilai tambah pertanian per tenaga kerja memberikan gambaran tentang produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian. Makin besar pendapatan atau penghasilan tenaga kerja/petani maka semakin besar kemampuan tenaga kerja untuk mengakses pangan dengan pola gizi seimbang, hal ini merupakan salah satu tujuan dari Tujuan 2 SDGs. Sementara itu, pertanian yang diukur adalah pertanian secara luas yaitu termasuk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan budidaya, perikanan tangkap dan termasuk peternakan.



TUJUAN 3

MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA



Munculnya dinamika penduduk berupa bonus demografi pada tahun 2015 memberikan tantangan bagi Indonesia khususnya Banyumas dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk. Meledaknya jumlah penduduk produktif serta bertambahnya penduduk usia lanjut memunculkan permasalahan beban penyakit ganda. Walaupun angka harapan hidup penduduk Banyumas mengalami peningkatan, akan tetapi angka kematian akibat penyakit tidak menular terus bertambah serta penyakit menular masih belum terberantas. Pola penyakit yang diderita oleh penduduk sebagian besar adalah penyakit infeksi menular, tetapi pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular. Disamping itu juga munculnya *emerging diseases*, yaitu suatu penyakit menular baru yang penyebarannya sangat cepat. Munculnya beban penyakit ganda dalam waktu bersamaan.

TARGET 3.1. PADA TAHUN 2030, MENGURANGI RASIO ANGKA KEMATIAN IBU HINGGA KURANG DARI 70 PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP

INDIKATOR 3.1.2. PERSENTASE PEREMPUAN PERNAH KAWIN BERUSIA 15-49 TAHUN YANG PROSES KELAHIRAN TERAKHIRNYA DITOLONG OLEH TENAGA KESEHATAN TERLATIH

Persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih adalah perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (memiliki kompetensi kebidanan) dengan jumlah perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun, dinyatakan dengan persentase. Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kompetensi kebidanan, yaitu seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar.



Cara Perhitungan:

Jumlah kelahiran terakhir pada perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di bagi jumlah perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun pada periode waktu sama dan dinyatakan dalam persentase.

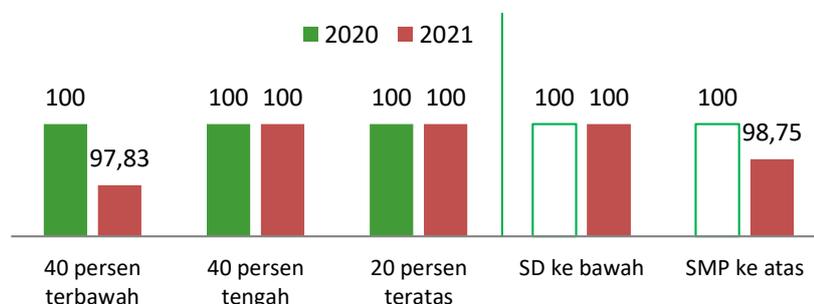
Rumus:

$$\text{Salinakes} = \frac{\text{Jumlah kelahiran terakhir pada perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih}}{\text{Jumlah perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun}} \times 100\%$$

Pertongan persalinan oleh tenaga terlatih (dokter, bidan, perawat dan tenaga kesehatan medis lainnya) di fasilitas kesehatan (puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit) menunjukkan kualitas terhadap pelayanan kesehatan, sehingga risiko kematian ibu melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi rendah.

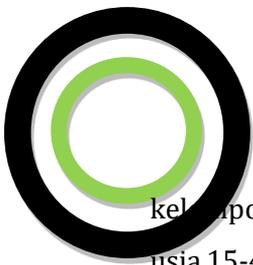
Mengukur kematian ibu secara akurat tergolong sulit, kecuali tersedia data registrasi yang sempurna tentang kematian dan penyebab kematian. Oleh karena itu sebagai proksi indikator digunakan persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.

GAMBAR 4.14. PERSENTASE PEREMPUAN PERNAH KAWIN BERUSIA 15-49 TAHUN YANG PROSES KELAHIRAN TERAKHIRNYA DITOLONG OLEH TENAGA KESEHATAN TERLATIH MENURUT KARAKTERISTIK, 2020-2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020-2021

Persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahirannya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di Kabupaten Banyumas tahun 2021 sebesar 99,03 persen. Artinya masih ada 0,97 persen perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun di Kabupaten Banyumas melahirkan tidak dengan tenaga kesehatan terlatih. Jika dilihat menurut karakteristik

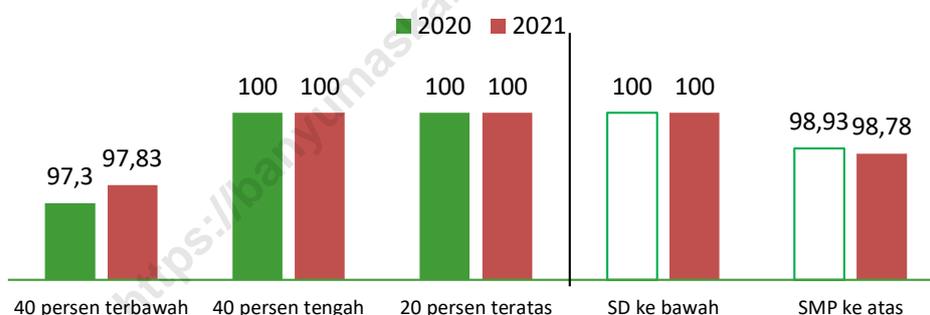


Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

kelompok pengeluaran dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga, perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan tidak di tenaga kesehatan terlatih adalah rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 40 persen terbawah dan dengan pendidikan tertinggi kepala rumah tangga SMP ke atas. Pentingnya melakukan proses persalinan dengan tenaga kesehatan terlatih guna mengurangi resiko angka kematian ibu dan bayi.

INDIKATOR 3.1.2.(A) PERSENTASE PEREMPUAN PERNAH KAWIN UMUR 15-49 TAHUN YANG PROSES MELAHIRKAN TERAKHIRNYA DI FASILITAS KESEHATAN

GAMBAR 4.15. PERSENTASE PEREMPUAN PERNAH KAWIN UMUR 15-49 TAHUN YANG PROSES MELAHIRKAN TERAKHIRNYA DI FASILITAS KESEHATAN MENURUT KARAKTERISTIK, 2020-2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020-2021

Indikator ini juga bertujuan mengurangi resiko kematian ibu dan berkaitan dengan capaian Angka Kematian Ibu (AKI). Sebanyak 99,03 persen perempuan pernah kawin berumur 15-49 tahun di melahirkan di fasilitas kesehatan. Angka ini tergolong tinggi karena hamper mencapai 100 persen. Namun masih perlu ada evaluasi karena dalam dua tahun terakhir, rumah tangga yang melahirkan bukan di fasilitas kesehatan adalah mereka dengan kelompok pengeluaran 40 persen terbawah dan pendidikan tertinggi kepala rumah tangga SMP ke atas.



TUJUAN 4

MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA



Tujuan 4 dibentuk dengan harapan untuk menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang. Pada tujuan ini akan disajikan gambaran pendidikan di Indonesia sesuai dengan indikator dan data terbaru untuk melihat proses yang sedang berjalan hingga saat ini. Pendidikan berkualitas merupakan prinsip dasar pembangunan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. Disamping itu, akses untuk memperoleh kesempatan belajar yang sama dan merata dalam setiap jenjang pendidikan selama hidup diharapkan dapat dicapai dari tujuan 4.

TARGET 4.1. PADA TAHUN 2030, MENJAMIN BAHWA SEMUA ANAK PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI MENYELESAIKAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TANPA DIPUNGUT BIAYA, SETARA DAN BERKUALITAS, YANG MENGARAH PADA CAPAIAN PEMBELAJARAN YANG RELEVAN DAN EFEKTIF

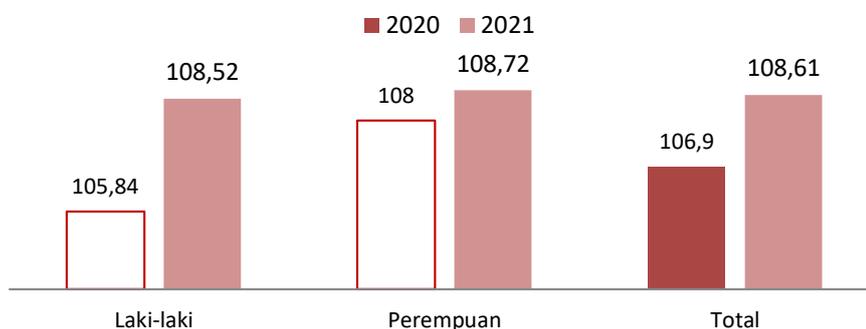
INDIKATOR 4.1.1(D). ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SD/MI/SEDERAJAT

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat (7-12 tahun). APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan. APK SD sederajat tercatat berada di atas angka 100 persen. Hal ini mengindikasikan partisipasi penduduk yang tinggi pada jenjang SD dengan masih ada anak yang bersekolah di jenjang SD namun usianya belum mencukupi (kurang dari 7 tahun) atau melebihi dari usia yang seharusnya (lebih dari 12 tahun).



Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

GAMBAR 4.16 ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SD/MI/SEDERAJAT MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK PENGELUARAN, 2020-2021

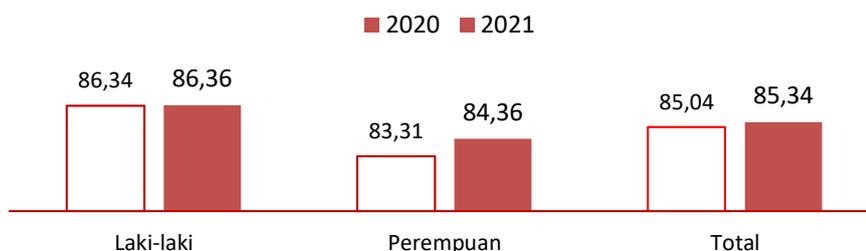


Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020-2021

Ditinjau menurut jenis kelamin, APK SD/MI/ sederajat perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Angka yang lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk di luar usia 7-12 tahun yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat. Hal ini menunjukkan kapasitas sistem pendidikan Banyumas sudah mampu menampung siswa pada jenjang SD/MI/ sederajat.

INDIKATOR 4.1.1(E).ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMP/MTS/SEDERAJAT

GAMBAR 4.17. ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMP/MTS/SEDERAJAT MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK PENGELUARAN, 2020-2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020-2021

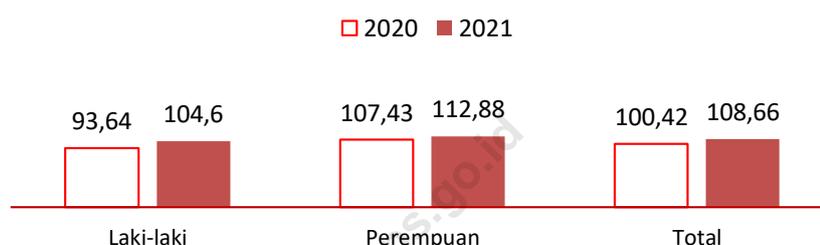
APK SMP/MTS/ sederajat perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. APK SMP/MTS/ sederajat menggambarkan daya serap penduduk umur 13-15 tahun pada jenjang pendidikan dasar kedua yaitu SMP sederajat. APK SMP Sederajat lebih rendah dibandingkan APK



SD sederajat. Hal ini menunjukkan daya serap penduduk untuk melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan SMP sederajat lebih rendah dibandingkan daya serap jenjang pendidikan SD.

INDIKATOR 4.1.1(E). ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMA/MA/SEDERAJAT

GAMBAR 4.18. ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMA/MA/SEDERAJAT MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK PENGELUARAN, 2020-2021

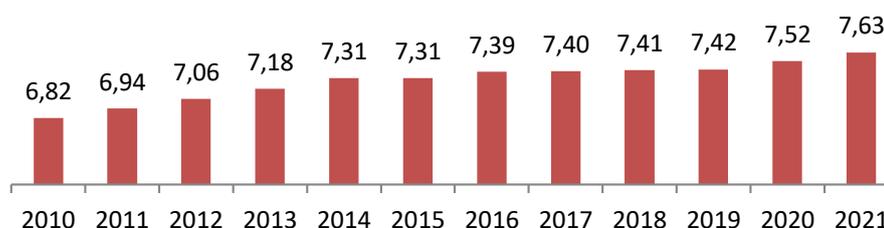


Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020-2021

APK SMA/MA/sederajat siswa berjenis kelamin laki-laki sebesar 104,60 persen sedangkan APK perempuan sebesar 112,88 persen. APK SMA/MA/sederajat laki-laki dan perempuan sebesar 108,66 persen artinya sebanyak 8,66 persen murid SMA/MA/sederajat berumur di luar rentang 16-18 tahun. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

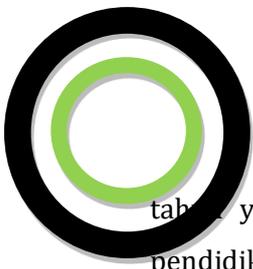
INDIKATOR 4.1.1(G). RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK UMUR ≥ 15 TAHUN

GAMBAR 4.19. RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK UMUR ≥ 15 TAHUN, 2010-2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2010-2021

Rata-rata lama sekolah menunjukkan banyaknya tahun yang telah diselesaikan dalam menempuh pendidikan formal. Secara periodik, rata-rata lama sekolah menunjukkan peningkatan setiap tahun. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Banyumas tahun 2021 sebesar 7,63



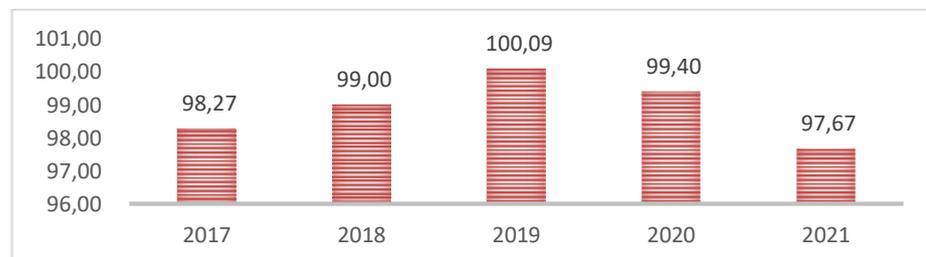
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Indikator yang berarti rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas di Banyumas mengenyam pendidikan hingga jenjang kelas VII atau VIII (kelas 1 atau kelas 2 SMP/ sederajat). Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan. Peningkatan rata-rata lama sekolah menunjukkan upaya dan kerja keras dari pemerintah, *stake holder*, dan masyarakat untuk meningkatkan taraf pendidikan.

TARGET 4.5. PADA TAHUN 2030, MENGHILANGKAN DISPARITAS GENDER DALAM PENDIDIKAN, DAN MENJAMIN AKSES YANG SAMA UNTUK SEMUA TINGKAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJURUAN, BAGI MASYARAKAT RENTAN TERMASUK PENYANDANG CACAT, MASYARAKAT PENDUDUK ASLI, DAN ANAK-ANAK DALAM KONDISI RENTAN

INDIKATOR 4.5.1. RASIO ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PEREMPUAN/LAKI-LAKI DI (1) SD/MI/SEDERAJAT; (2)SMP/MTS/SEDERAJAT;(3)SMA/SMK/MA/SEDERAJAT; DAN APK PEREMPUAN/LAKI-LAKI DI PT

GAMBAR 4.20. RASIO ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PEREMPUAN/LAKI-LAKI DI SD/MI/SEDERAJAT 2017-2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017-2021

Untuk menggambarkan kesetaraan dalam memperoleh akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan, dibentuklah indikator Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki pada level SD, SMP, dan SMA. Rasio APM perempuan/laki-laki adalah perbandingan antara APM perempuan terhadap APM laki-laki pada satuan jenjang pendidikan tertentu. Jika indikator ini berhasil mencapai target yang diharapkan atau bernilai 100, artinya kesetaraan gender dalam



hal pendidikan sudah terwujud. Status dan kemampuan perempuan juga akan diakui sebanding dengan laki-laki.

Rasio APM perempuan/laki-laki pada jenjang SD sederajat tahun 2021 sebesar 97,67 persen mencerminkan penduduk perempuan umur 7-12 tahun yang bersekolah tepat di jenjang SD sederajat lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki pada kelompok umur yang sama. Rasio APM perempuan/laki-laki pada tahun 2021 paling rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2017 – 2020) artinya terjadi penurunan jumlah penduduk perempuan umur 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang SD sederajat.

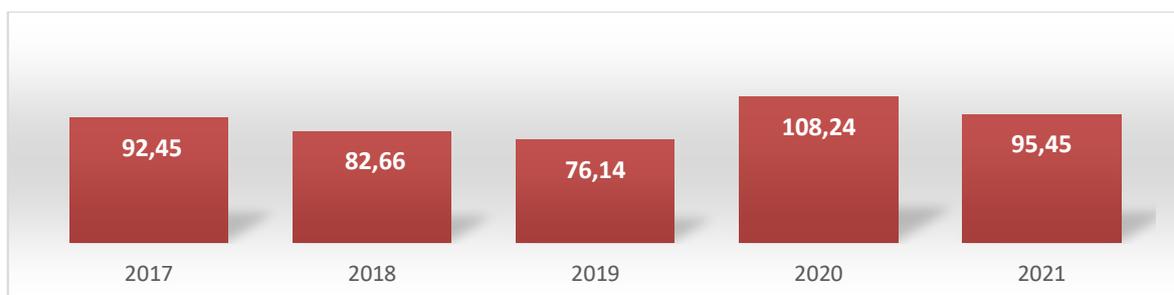
GAMBAR 4.21. RASIO ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PEREMPUAN/LAKI-LAKI DI SMP/MTS/SEDERAJAT, 2017-2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017-2021

Pada jenjang SMP sederajat, rasio APM tahun 2021 sebesar 95,13 persen atau turun dari tahun sebelumnya yakni 96,40 persen. Artinya ada penurunan jumlah penduduk perempuan usia 13-15 tahun yang bersekolah tepat di jenjang SMP sederajat.

GAMBAR 4.22. RASIO ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PEREMPUAN/LAKI-LAKI DI SMA/MA/SEDERAJAT, 2017-2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017-2021



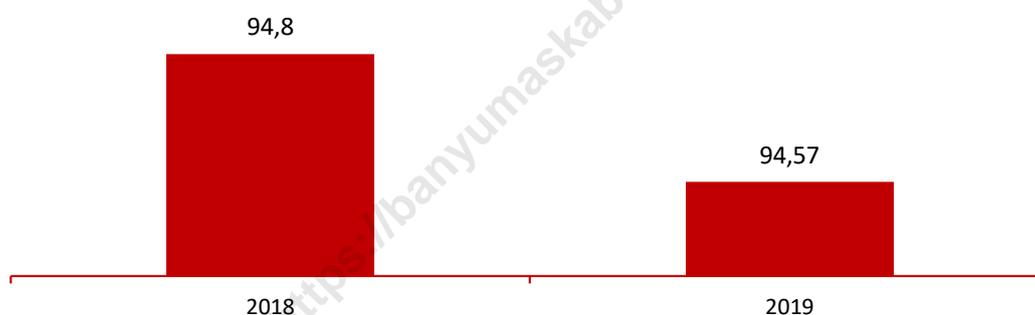
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sama halnya dengan rasio APM SMP, rasio APM SMA sederajat pada tahun 2021 mengalami penurunan. Artinya dalam setahun terakhir, terjadi penurunan minat penduduk perempuan usia 13-15 dan 16-18 tahun untuk bersekolah tepat waktu di jenjang SMP dan SMA.

TARGET 4.6. PADA TAHUN 2030, MENJAMIN BAHWA SEMUA REMAJA DAN PROPORSI KELOMPOK DEWASA TERTENTU, BAIK LAKI-LAKI MAUPUN PEREMPUAN, MEMILIKI KEMAMPUAN LITERASI DAN NUMERASI.

INDIKATOR 4.6.1.(A) ANGKA MELEK HURUF (AMH) PENDUDUK USIA DI ATAS 15 TAHUN

GAMBAR 4.23. ANGKA MELEK HURUF (AMH) PENDUDUK 15 TAHUN KE ATAS, 2018 DAN 2019



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018-2019

Angka melek huruf (AMH) Kabupaten Banyumas tahun 2019 sebesar 94,57 persen atau turun 0,23 poin dari tahun 2018 yakni 94,89 persen. Angka melek huruf sebesar 94,57 persen menunjukkan bahwa 94,57 persen penduduk di Kabupaten Banyumas yang berumur 10 tahun ke atas dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Jika dilihat menurut jenis kelamin, angka melek huruf laki-laki lebih besar dari angka melek huruf perempuan. AMH laki-laki sebesar 96,47 persen sedangkan AMH perempuan sebesar 93,35 persen. Jika dilihat menurut kelompok pengeluaran, penduduk yang miskin (kelompok pengeluaran 40% terbawah) memiliki angka melek huruf terendah dibandingkan kategori lainnya yakni kelompok 40 persen tangan dan 20 persen teratas. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran.



TUJUAN 5

MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN



Kesetaraan gender tidak hanya merupakan hak asasi manusia yang mendasar, namun merupakan dasar penting bagi dunia yang damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Tujuan 5 memiliki maksud untuk meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan dalam mengembangkan bakat dan potensinya sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki. Hal ini berarti, diskriminasi dan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Selain itu, pembangunan yang adil dan berkelanjutan harus menjamin akses perempuan dan anak perempuan terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, pekerjaan yang layak, bermasyarakat, serta memiliki hak membuat keputusan dalam bidang politik.

TARGET 5.5. MENJAMIN PARTISIPASI PENUH DAN EFEKTIF, DAN KESEMPATAN YANG SAMA BAGI PEREMPUAN UNTUK MEMIMPIN DI SEMUA TINGKAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KEHIDUPAN POLITIK, EKONOMI, DAN MASYARAKAT.

INDIKATOR 5.5.1*. PROPORSI KURSI YANG DIDUDUKI PEREMPUAN DI PARLEMEN TINGKAT PUSAT, PARLEMEN DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH.

GAMBAR 4.24. KOMPOSISI KURSI YANG DIDUDUKI PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD), 2019-2021



Sumber: Publikasi Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2020-2022



Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

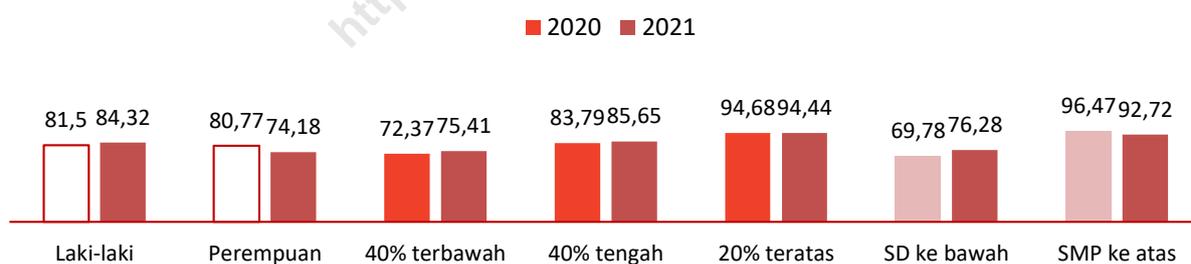
Komposisi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Banyumas terus meningkat. Pada tahun 2022 sebanyak 22 persen anggota DPRD berjenis kelamin perempuan. Keikutsertaan perempuan dalam parlemen mengalami kenaikan dimana komposisi kursi yang diduduki perempuan pada 2019 sebesar 20 persen sedangkan pada tahun 2020 sebesar 22 persen.

Indikator ini penting untuk mengukur sampai sejauh mana perempuan memiliki akses yang sama untuk berada dalam posisi penting pengambil keputusan dalam proses politik formal khususnya di lembaga legislatif. Perempuan yang mampu duduk di kursi legislatif merupakan cerminan pemberdayaan perempuan dalam kehidupan politik dan publik.

TARGET 5.B. MENINGKATKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI YANG MEMAMPUKAN, KHUSUSNYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

INDIKATOR 5.B.1*. PROPORSI INDIVIDU YANG MENGUASAI/MEMILIKI TELEPON GENGAM

GAMBAR 4.25. PERSENTASE INDIVIDU YANG MENGGUNAKAN TELEPON GENGAM, 2020-2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020-2021

Data mengenai persentase individu yang menguasai/memiliki telepon genggam diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional. Angka tersebut diperoleh dengan membagi jumlah individu yang memiliki telepon genggam dengan jumlah penduduk periode yang sama. Indikator ini menggambarkan tingkat akses masyarakat terhadap komunikasi dan informasi melalui jaringan bergerak (*mobile*) *Fixed Wireless Access* dan seluler. Penduduk laki-laki yang memiliki telepon genggam lebih banyak dibandingkan perempuan. Selain itu persentase individu yang memiliki telepon genggam paling banyak adalah mereka yang termasuk dalam kelompok pengeluaran 20 persen teratas dan pendidikan SMP ke atas artinya penduduk yang mapan dan berpendidikan.



TUJUAN 6

MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN



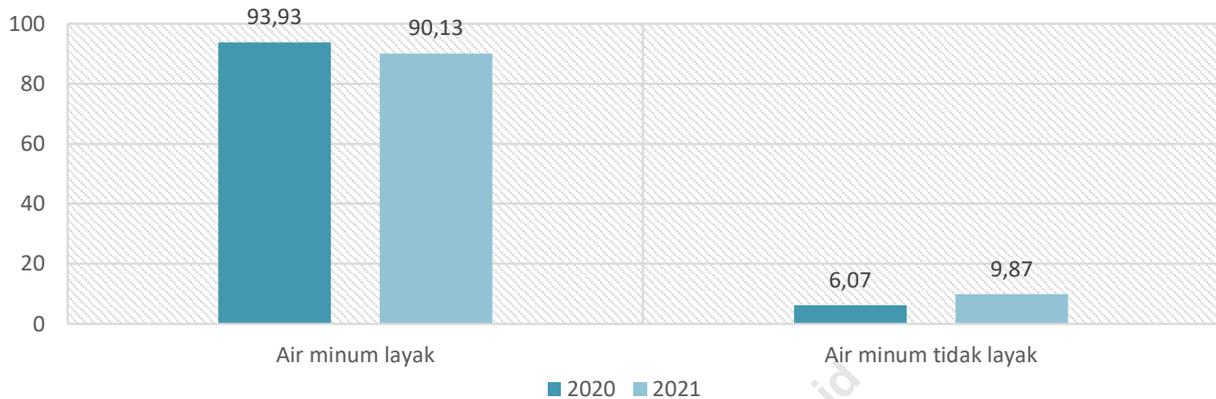
TARGET 6.1. PADA TAHUN 2030, MENCAPAI AKSES UNIVERSAL DAN MERATA TERHADAP AIR MINUM YANG AMAN DAN TERJANGKAU BAGI SEMUA

INDIKATOR 6.1.1(A).PROPORSI POPULASI YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN SUMBER AIR MINUM LAYAK DAN BERKELANJUTAN

Air minum layak dan bersih adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Indikator ini mengukur persentase penduduk perkotaan dan perdesaan yang mengakses pelayanan dasar untuk air minum yang aman, seperti yang didefinisikan oleh *Joint Monitoring Programme* (Program Pemantauan Gabungan) WHO/UNICEF. Indikator ini menjelaskan keadaan air minum yang lebih rinci dibandingkan indikator “air minum dasar” yang telah dirancang sebelumnya dengan menggabungkan penilaian terhadap kualitas dan keamanan air yang digunakan masyarakat. Dalam laporan ini indikator air minum aman belum bisa disajikan karena masalah ketersediaan data. Sebagai proksi digunakan indikator air minum layak.



GAMBAR 4.26 PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT SUMBER AIR MINUM LAYAK MENURUT KARAKTERISTIK, 2020-2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020-2021

Air minum yang layak adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.

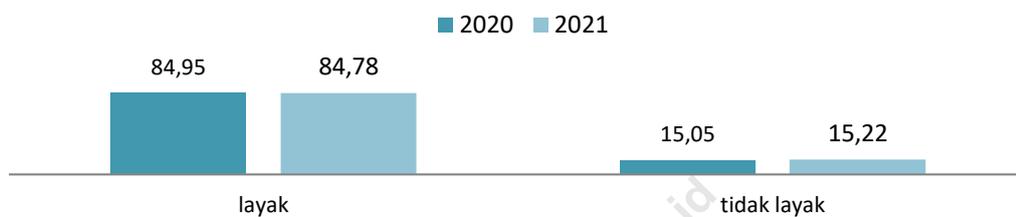
Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak di Kabupaten Banyumas tahun 2021 sebesar 90,13 persen atau turun 3,8 poin dari tahun 2020. Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air layak berdasarkan asumsi bahwa sumber air layak menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Air yang tidak berkualitas merupakan penyebab langsung berbagai sumber penyakit. Untuk akses terhadap air minum yang aman membutuhkan pemeriksaan biologis, fisika, kimia.

TARGET 6.2. PADA TAHUN 2030, MENCAPAI AKSES TERHADAP SANITASI DAN KEBERSIHAN YANG MEMADAI DAN MERATA BAGI SEMUA, DAN MENGHENTIKAN PRAKTIK BUANG AIR BESAR DI TEMPAT SEMBARANG, MEMBERIKAN PERHATIAN KHUSUS PADA KEBUTUHAN KAUM PEREMPUAN, SERTA KELOMPOK MASYARAKAT RENTAN



INDIKATOR 6.2.1(B). PROPORSI POPULASI PENDUDUK YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN SANITASI LAYAK DAN BERKELANJUTAN

GAMBAR 4.27. PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENGGUNAKAN AKSES AIR LAYAK MENURUT KARAKTERISTIK, 2020-2021

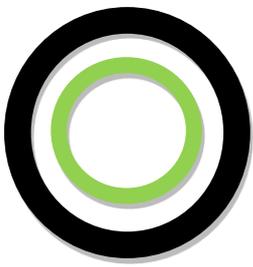


Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020-2021

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tangki septik (*septic tank*) atau system pengolahan air limbah (SPAL) dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangganya sendiri.

Sanitasi layak dan berkelanjutan meliputi lima kriteria yakni stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga dengan aman, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga dengan aman. Proporsi populasi yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dibagi dengan penduduk atau rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.

Persentase rumah tangga yang memiliki kondisi sanitasi layak di Kabupaten Banyumas tahun 2021 sebanyak 84,78 persen atau turun 0,17 poin dari tahun 2020. Jika dilihat menurut karakteristik jenis kelamin kepala rumah tangga, kelompok pengeluaran dan pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, rumah tangga yang memperoleh akses layak hampir merata yakni sekitar 81 hingga 88 persen.



TUJUAN 7

MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN

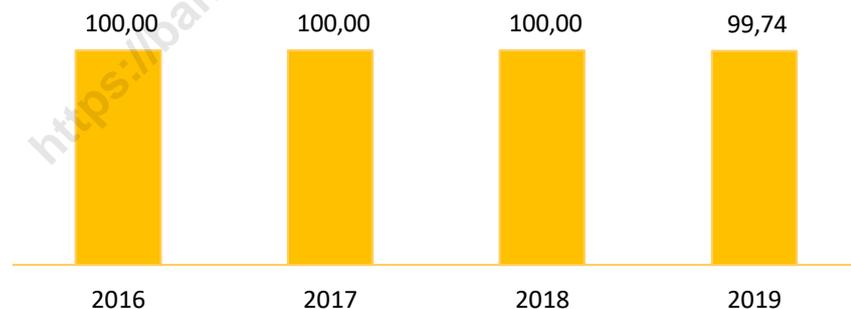


TARGET 7.1. PADA TAHUN 2030, MENJAMIN AKSES UNIVERSAL LAYANAN ENERGI YANG TERJANGKAU DAN MODERN

Perencanaan energi perlu dilakukan agar dapat menjamin ketersediaan energy dengan harga yang terjangkau untuk jangka panjang. Kebutuhan energi masyarakat akan terus tumbuh seiring pertumbuhan penduduk, penambahan sarana transportasi seperti kereta api dan angkutan masal Mass Rapid Transit/MRT (BPPT, 2014). Oleh karenanya, perlu ada peningkatan layanan energi di setiap daerah.

INDIKATOR 7.1.1*. RASIO ELEKTRIFIKASI

GAMBAR 4.28 RASIO ELEKTRIFIKASI (PERSEN), 2016-2019



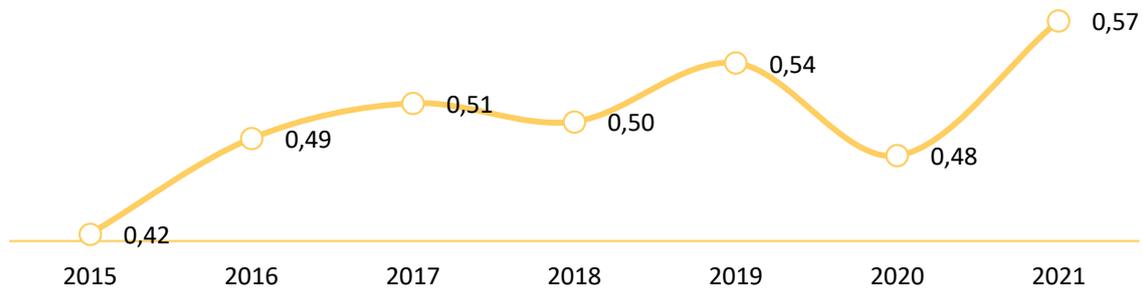
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional

Rasio elektrifikasi merupakan perbandingan jumlah rumah tangga berlistrik dengan jumlah rumah tangga total. Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah rumah tangga yang sudah mendapatkan akses listrik. Rasio elektrifikasi diperoleh dari hasil susenas dengan melihat persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik baik listrik PLN maupun non PLN. Capaian rasio elektrifikasi dalam kurun waktu empat tahun terakhir yakni 2016 hingga 2018 di Kabupaten Banyumas telah mencapai 100 persen sedangkan pada tahun 2019 mencapai 99,74 persen. Artinya masih ada 0,26 persen rumah tangga belum menggunakan sumber penerangan listrik.



INDIKATOR 7.1.1(A). KONSUMSI LISTRIK PER KAPITA

GAMBAR 4.29 KONSUMSI LISTRIK PERKAPITA (MWH/KAPITA), 2015-2021



Sumber: PLN dan BPS (diolah)

Konsumsi listrik per kapita diperoleh dengan membagi total penggunaan energi listrik dengan jumlah penduduk. Total penggunaan listrik diperoleh dari data PLN sedangkan data jumlah penduduk diperoleh dari data BPS. Indikator ini digunakan untuk mengetahui rata-rata konsumsi energi listrik tiap penduduk. Konsumsi listrik perkapita sejak 2015 hingga 2021 terus mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2020 sedikit menurun menjadi 0,48 mwh per kapita. Pada tahun 2021, rasio elektrifikasi mencapaimenjadi 0,54 mwh. Angka ini masih berada di bawah sasaran konsumsi listrik per kapita nasional yaitu sebesar 1,2 mwh. Indikator ini digunakan untuk mengetahui rata-rata konsumsi energi listrik per orang.



TUJUAN 8

MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN



Perekonomian Banyumas sedang menghadapi tantangan besar. Tantangan ini terkait upaya mengubah pola pertumbuhan ekonomi yang sarat tergantung pada sumber daya alam yang berlimpah dan upah tenaga kerja yang murah, menjadi pola pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif (*inclusive growth*) serta ramah lingkungan dan berkelanjutan (*green growth*). Pertumbuhan yang inklusif didefinisikan sebagai pertumbuhan yang menjamin akses yang adil bagi seluruh anggota masyarakat terhadap peluang ekonomi yang tercipta. Sedangkan pertumbuhan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan didefinisikan sebagai strategi pertumbuhan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan dan ekosistem dalam jangka panjang.

TARGET 8.1. MEMPERTAHANKAN PERTUMBUHAN EKONOMI PERKAPITA SESUAI DENGAN KONDISI NASIONAL DAN KHUSUSNYA, SETIDAKNYA 7 PERSEN PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK BRUTO PER TAHUN DI NEGARA BERKEMBANG

INDIKATOR 8.1.1*. LAJU PERTUMBUHAN PDRB PERKAPITA

GAMBAR 4.30 LAJU PERTUMBUHAN PDRB PERKAPITA, 2015-2021



Sumber: Publikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Banyumas 2015-2021

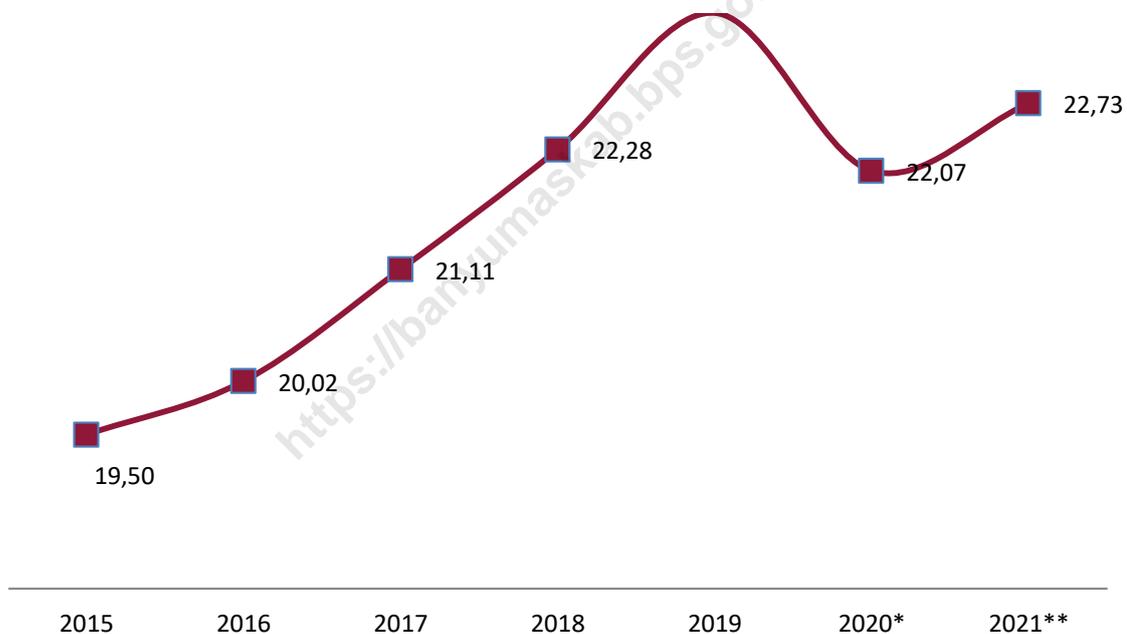
Laju pertumbuhan PDRB perkapita Banyumas pada tahun 2015 hingga 2021 mengalami pertumbuhan yang positif kecuali pada tahun 2020 mengalami kontraksi. Capaian laju pertumbuhan PDRB perkapita tahun 2021 sebesar yakni 2,99 persen.



INDIKATOR 8.1.1(A). PDRB PERKAPITA

PDRB perkapita menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan PDRB dan jumlah penduduk. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) digunakan untuk menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Banyumas rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai dimaksud pada masing-masing tahun. Pendapatan perkapita juga merupakan salah satu ukuran yang paling dapat diandalkan untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah. Pendapatan per kapita yang meningkat dapat menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan data BPS, PDRB per kapita Kabupaten Banyumas menunjukkan kenaikan dalam empat tahun terakhir. PDRB per kapita penduduk Banyumas pada tahun 2021 mencapai Rp 22,73 juta per tahun.

GAMBAR 4.31 PDRB ADHK PERKAPITA (JUTA RUPIAH), 2015-2021



Sumber: Publikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Banyumas 2016-2022

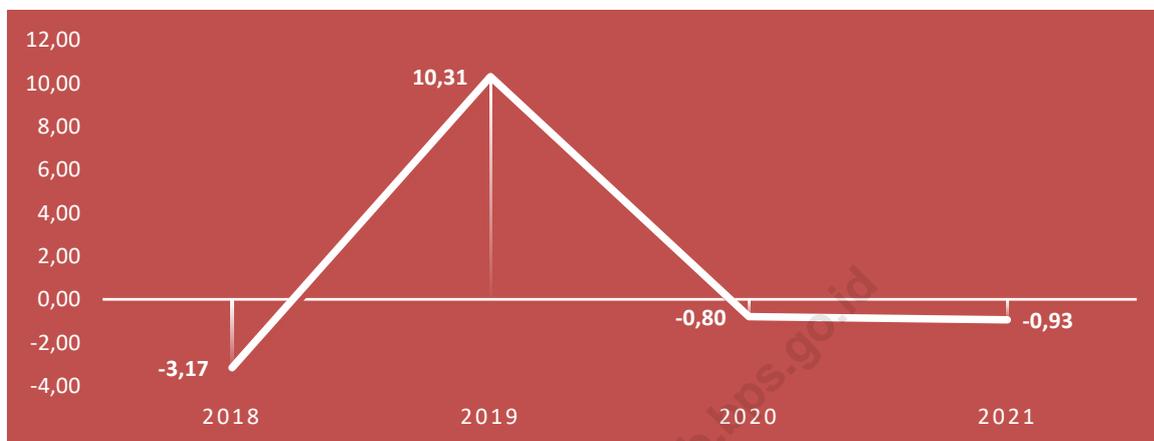
TARGET 8.2. MENCAPAI TINGKAT PRODUKTIVITAS EKONOMI YANG LEBIH TINGGI, MELALUI DIVERSIFIKASI, PENINGKATAN DAN INOVASI TEKNOLOGI, TERMASUK MELALUI FOKUS PADA SEKTOR YANG MEMBERI NILAI TAMBAH TINGGI DAN PADAT KARYA



Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

INDIKATOR 8.2.1*. LAJU PERTUMBUHAN PDRB PER TENAGA KERJA/TINGKAT PERTUMBUHAN PDRB RIIL PER ORANG BEKERJA PER TAHUN

GAMBAR 4.32 LAJU PERTUMBUHAN PDRB PER TENAGA KERJA, 2018-2021



Sumber: Sakernas dan PDRB (diolah)

Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja adalah rata-rata laju pertumbuhan PDRB per kapita tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan, sedangkan data tenaga kerja yang digunakan adalah jumlah orang yang bekerja. Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja diperoleh dengan mengurangi nilai PDRB perkapita tenaga kerja pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya) dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1 dikalikan 100 persen. Indikator ini digunakan untuk melihat produktivitas ekonomi dari sisi efisiensi dan efektivitas pekerja. Hal ini dapat diukur dengan menghitung PDRB riil per orang yang bekerja.

Pada tahun 2019 menunjukkan produktivitas ekonomi tertinggi selama tahun 2018 sampai 2021 yakni sebesar 10,31 persen. Meskipun pada tahun 2019 merupakan masa pandemi covid namun nilai efektivitas pekerja mencapai nilai yang optimum. Adapun produktivitas tenaga kerja tahun 2018, 2020 dan 2021 menunjukkan angka negatif artinya terjadi penurunan produktivitas pada tahun-tahun tersebut.

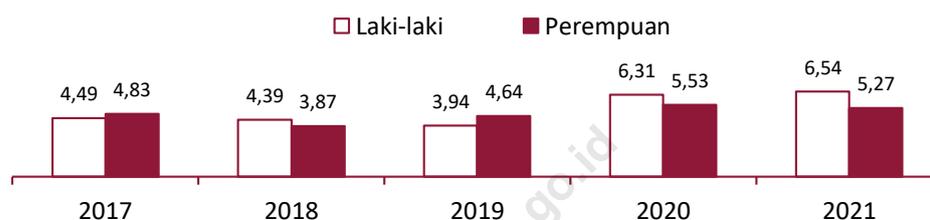
TARGET 8. 5. PADA TAHUN 2030, MENCAPAI PEKERJAAN TETAP DAN PRODUKTIF DAN PEKERJAAN YANG LAYAK BAGI SEMUA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI, TERMASUK BAGI PEMUDA DAN PENYANDANG



DIFABILITAS, DAN UPAH YANG SAMA UNTUK PEKERJAAN YANG SAMA NILAINYA

INDIKATOR 8.5.2*. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR

GAMBAR 4.33 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA BERDASARKAN JENIS KELAMIN, 2017-2021



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Konsep pengangguran menurut BPS yaitu penduduk yang aktif mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan. Indikator ini digunakan untuk melihat pencapaian ketenagakerjaan secara penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi seluruh perempuan dan laki-laki, termasuk kaum muda dan orang disabilitas.

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Banyumas sejak tahun 2017 hingga 2021 terus mengalami kenaikan baik TPT laki-laki maupun perempuan. TPT laki-laki pada tahun 2021 sebesar 6,54 persen sedangkan TPT perempuan sebesar 5,27 persen. TPT laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan menunjukkan kesempatan bekerja penduduk perempuan lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki.



TUJUAN 9

MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN,



Pembangunan berkelanjutan tujuan 9 mengandung tiga aspek penting dari pembangunan berkelanjutan yaitu: infrastruktur, industrialisasi dan inovasi. Infrastruktur menyediakan fasilitas fisik dasar yang penting untuk bisnis dan masyarakat; industrialisasi mendorong pertumbuhan ekonomidan penciptaan lapangan kerja sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan; dan inovasi memperluas kemampuan teknologi sektor industri dan mengarah pada pengembangan keterampilan baru.

TARGET 9.1. MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN TANGGUH, TERMASUK INFRASTRUKTUR REGIONAL DAN LINTAS BATAS, UNTUK Mendukung pembangunan ekonomi dan Kesejahteraan manusia dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua

INDIKATOR 9.1.2(A). JUMLAH BANDARA

Bandara atau Bandar udara merupakan kawasan di daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Indikator ini digunakan sebagai salah satu proksi dalam mengukur terwujudnya penyelenggaraan penerbangan yang andal dan berkemampuan dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan daerah.

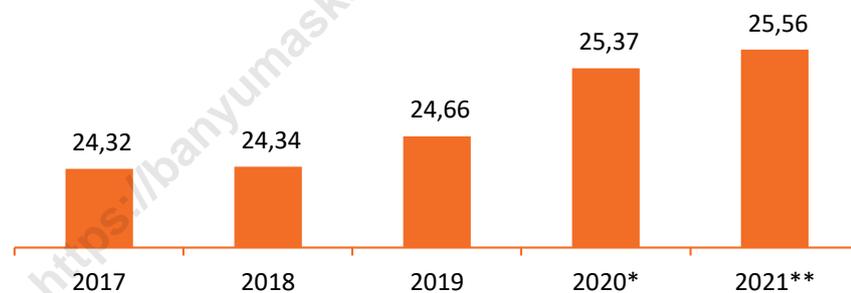
Hingga tahun 2021, Kabupaten Banyumas belum memiliki bandara. Namun demikian, akses bandara ada di Kabupaten Purbalingga yang merupakan kabupaten penyangga Kabupaten Banyumas.



TARGET 9.2. MEMPROMOSIKAN INDUSTRIALISASI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN DAN PADA TAHUN 2030, SECARA SIGNIFIKAN MENINGKATKAN PROPORSI INDUSTRI DALAM LAPANGAN KERJA DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO SEJALAN DENGAN KONDISI NASIONAL DAN MENINGKATKAN DUA KALI LIPAT PROPORSINYA DI NEGARA KURANG BERKEMBANG

INDIKATOR 9.2.1*. PROPORSI NILAI TAMBAH SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR TERHADAP PDRB DAN PERKAPITA

GAMBAR 4.34 PROPORSI NILAI TAMBAH SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR TERHADAP PDRB, 2017-2021



Sumber: Publikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Banyumas 2022

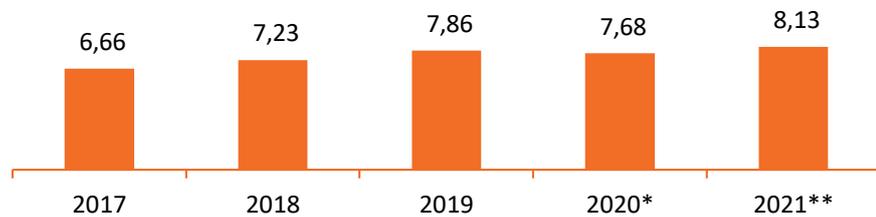
Industri manufaktur secara luas didefinisikan sebagai transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru, terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir dan eceran). Adapun proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB merupakan persentase nilai tambah manufaktur terhadap PDRB. Indikator ini digunakan sebagai ukuran kontribusi output industri terhadap perekonomian suatu wilayah.

Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur di Kabupaten Banyumas dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Namun kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDRB sudah berada di atas 20 persen. Besaran kontribusi industri manufaktur terhadap PDRB tahun 2021 mencapai 25,56 persen.



Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

GAMBAR 4.35 PROPORSI NILAI TAMBAH SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR PERKAPITA (JUTA RUPIAH), 2017-2021

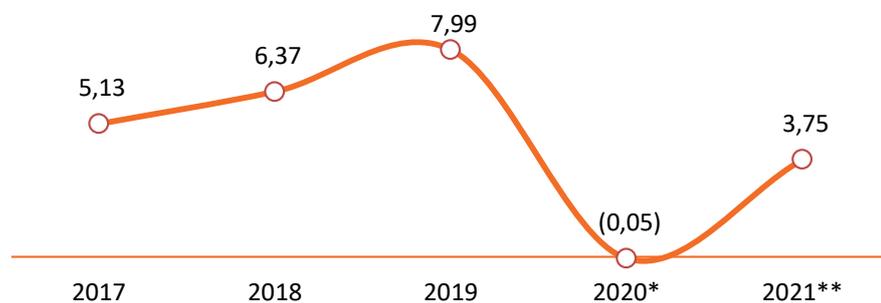


Sumber: BPS Kabupaten Banyumas

Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur perkapita merupakan persentase nilai tambah industri manufaktur terhadap jumlah penduduk. Nilai tambah sektor industri manufaktur perkapita mengalami peningkatan. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur di Kabupaten Banyumas tahun 2021 sebesar 8,13 juta rupiah perkapita. Peningkatan nilai tambah sektor industri manufaktur perkapita menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan sektor industri manufaktur perkapita tanpa mempertimbangkan nilai tambah tersebut dinikmati oleh residen maupun non residen.

INDIKATOR 9.2.1(A). LAJU PERTUMBUHAN PDRB INDUSTRI MANUFAKTUR

GAMBAR 4.36 LAJU PERTUMBUHAN PDRB INDUSTRI MANUFAKTUR, 2017-2021



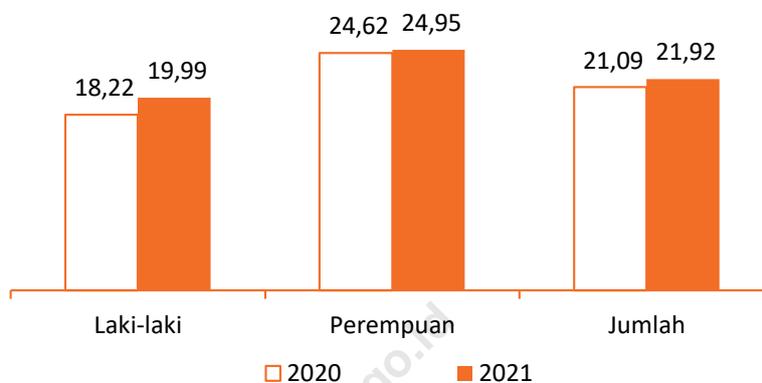
Sumber: BPS Kabupaten Banyumas

Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur dalam lima tahun terakhir (2017-2021) mengalami fluktuasi namun tetap mengalami pertumbuhan kecuali pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 0,05 persen. Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur Kabupaten Banyumas tahun 2021 mencapai 3,75 persen atau mengalami percepatan dibandingkan tahun 2020.



INDIKATOR 9.2.2*. PROPORSI TENAGA KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR

GAMBAR 4.37 PROPORSI TENAGA KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR, 2020- 2021



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) – BPS

Tenaga kerja adalah semua orang yang bekerja pada suatu usaha dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang (pekerja dibayar) maupun pekerja pemilik dana atau pekerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan usaha tetapi tidak dibayar (pekerja tidak dibayar). Adapun pekerja keluarga yang bekerja kurang dari 1/3 jam kerja normal (satu shift) tidak dianggap pekerja. Proporsi tenaga kerja sektor manufaktur adalah jumlah tenaga kerja sektor industri per jumlah tenaga kerja total. Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase tenaga kerja di sektor industri manufaktur.

Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur tahun 2021 lebih besar dibandingkan pada tahun 2020. Proporsi tenaga kerja industri manufaktur pada tahun 2021 mencapai 21,92 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, proporsi pekerja industri manufaktur tenaga kerja perempuan lebih banyak dibandingkan tenaga kerja laki-laki. Proporsi tenaga kerja industri manufaktur berjenis kelamin laki-laki tahun 2021 sebesar 19,99 persen sedangkan tenaga kerja perempuan sebesar 24,95 persen.

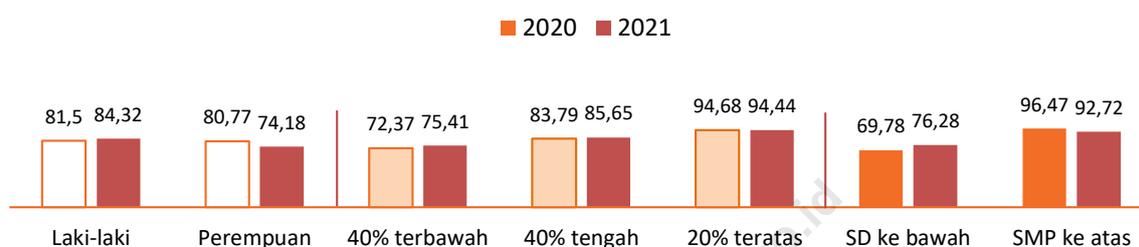
TARGET 9.C. SECARA SIGNIFIKAN MENINGKATKAN AKSES TERHADAP TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, DAN MENGUSAHAKAN PENYEDIAAN AKSES UNIVERSAL DAN TERJANGKAU INTERNET DI NEGARA-NEGARA KURANG BERKEMBANG PADA TAHUN 2020



Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

INDIKATOR 9.C.1(A). PROPORSI INDIVIDU YANG MENGGUNAKAN TELEPON GENGAM

GAMBAR 4.38 PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 5 TAHUN KE ATAS YANG MENGGUNAKAN/MEMILIKI TELEPON SELULER (HP) DALAM 3 BULAN TERAKHIR MENURUT KARAKTERISTIK, 2020-2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) – BPS

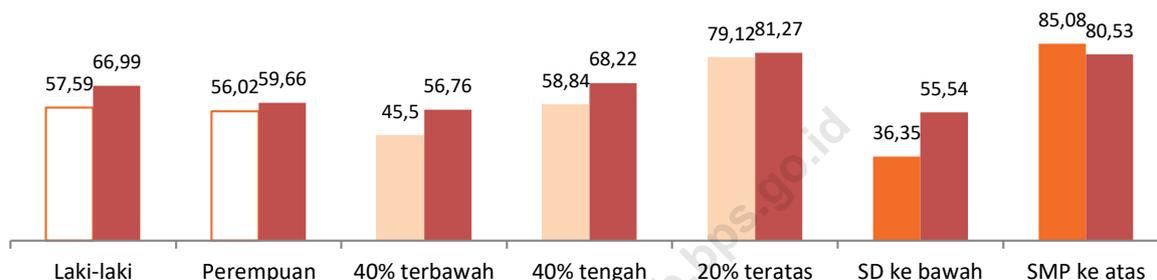
Perbandingan antara individu yang memiliki telepon genggam terhadap jumlah penduduk dinyatakan dalam persentase. Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam diperoleh dengan cara membagi jumlah individu yang memiliki telepon genggam dengan jumlah penduduk pada periode yang sama dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini menggambarkan tentang tingkat akses masyarakat terhadap komunikasi dan informasi melalui jaringan bergerak (*mobile Fixed Wireless Access* dan seluler.

Proporsi penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menggunakan/memiliki telepon seluler (HP) dalam 3 bulan terakhir tahun 2021 sebesar 83,37 persen atau meningkat dibandingkan tahun 2020 yakni 81,42 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 83,37 persen penduduk berumur 5 tahun ke atas di Kabupaten Banyumas sudah memiliki telepon seluler. Jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang berjenis kelamin laki-laki tahun 2021 sebesar 84,32 persen tahun 2020 sebesar 81,5 persen sedangkan perempuan tahun 2021 sebesar 74,18 persen tahun 2020 80,77 persen. Dilihat menurut kelompok pengeluaran, rumah tangga yang paling sedikit menggunakan/memiliki telepon seluler berasal dari rumah tangga miskin (40% terbawah) tahun 2021 yakni 75,41 persen tahun 2020 72,37 persen. Sedangkan dilihat menurut pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, pengguna telepon seluler paling sedikit berasal dari rumah tangga dengan kepala rumah tangga berpendidikan SD ke bawah tahun 2021 yakni 76,28 persen tahun 2020 sebesar 69,78 persen.



INDIKATOR 9.C.1(B). PROPORSI INDIVIDU YANG MENGGUNAKAN INTERNET

GAMBAR 4.39 PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 5 TAHUN KE ATAS YANG MENGAKSES INTERNET (TERMASUK FACEBOOK, TWITTER, BBM, WHATSAPP) DALAM 3 BULAN TERAKHIR MENURUT KARAKTERISTIK, 2020-2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) – BPS

Proporsi individu yang menggunakan internet dari berbagai macam lokasi dalam tiga bulan terakhir, baik menggunakan komputer, telepon seluler, tablet, PDA, peralatan games, TV digital, dsb baik menggunakan jaringan tetap (*fixed*) maupun mobile. Internet menjadi alat penting bagi publik untuk mengakses informasi yang juga relevan dengan keterbukaan fundamental terhadap informasi. Internet menjadi indikator kunci yang digunakan oleh pengambil kebijakan untuk mengukur pembangunan masyarakat bidang informasi dan pertumbuhan isi internet.

Persentase penduduk Banyumas berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet tahun 2021 sebesar 66,31 persen sedangkan tahun 2020 sebesar 57,60 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin kepala rumah tangga, yang mengakses internet paling banyak berasal dari rumah tangga dengan kepala rumah tangga laki-laki tahun 2021 sebesar 66,99 persen sedangkan tahun 2020 sebesar 57,59 persen sedangkan rumah tangga dengan jenis kelamin perempuan tahun 2021 sebesar 59,66 persen dan tahun 2020 sebanyak 56,02 persen. Jika dilihat menurut kelompok pengeluaran, persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet terbanyak adalah kelompok pengeluaran 20 persen teratas tahun 2021 sebesar 81,27 persen sedangkan tahun 2020 yakni 79,12 persen. Jika dilihat menurut pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet terbanyak adalah penduduk yang berpendidikan SMP ke atas tahun 2021 yakni 80,53 persen sedangkan tahun 2020 sebanyak 85,08 persen.



TUJUAN 10

MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA

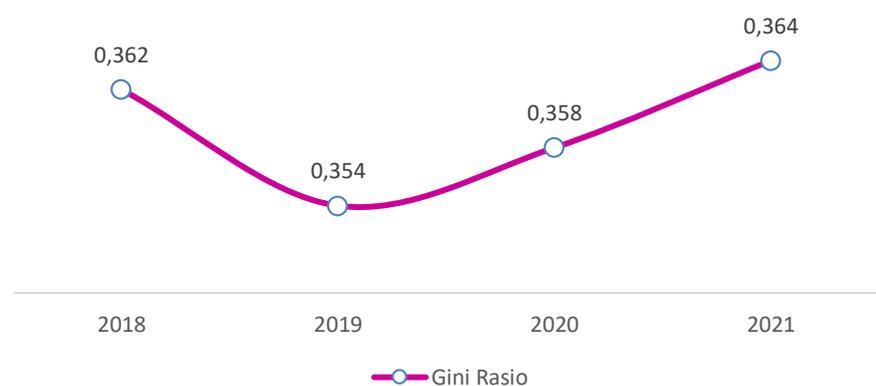


Tujuan 10 bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan berdasarkan usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, etnis, asal, agama, status ekonomi atau status lainnya di suatu negara. Tujuan ini juga membahas kesenjangan antar negara, termasuk yang terkait dengan perwakilan, migrasi dan bantuan pembangunan. Kesenjangan pendapatan adalah masalah global yang membutuhkan solusi global. Hal ini melibatkan perbaikan peraturan dan pemantauan pasar keuangan dan institusi, mendorong bantuan pembangunan dan investasi langsung asing ke daerah-daerah di mana kebutuhannya paling besar. Memfasilitasi migrasi yang aman dan mobilitas orang juga menjadi kunci untuk menjembatani kesenjangan yang melebar. Tujuan 10 juga membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan representasi dari negara-negara berkembang dalam pengambilan keputusan global dan bantuan pembangunan.

TARGET 10.1. PADA TAHUN 2030, SECARA PROGRESIF MENCAPAI DAN MEMPERTAHANKAN PERTUMBUHAN PENDAPATAN PENDUDUK YANG BERADA DI BAWAH 40% DARI POPULASI PADA TINGKAT YANG LEBIH TINGGI DARI RATA-RATA NASIONAL

INDIKATOR 10.1.1*. KOEFISIEN GINI

GAMBAR 4.40 KOEFISIEN GINI, 2018-2021



Sumber: BPS Kabupaten Banyumas

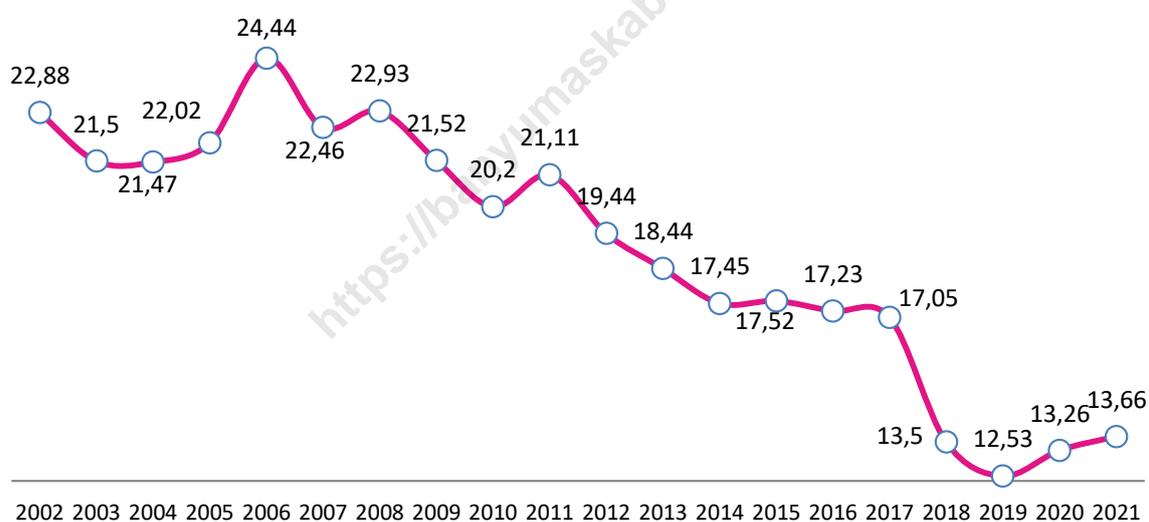


Koefisien gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien gini bernilai nol menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan koefisien gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, koefisien gini diupayakan agar mendekati nol. Koefisien gini umumnya digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan secara menyeluruh.

Koefisien gini Kabupaten Banyumas mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat. Peningkatan koefisien gini menunjukkan ketimpangan pendapatan antara penduduk kaya dan miskin yang semakin jauh. Koefisien gini Banyumas tahun 2021 mencapai 0,364.

INDIKATOR 10.1.1(A). PERSENTASE PENDUDUK YANG HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN NASIONAL

GAMBAR 4.41 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN, 2002-2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional

Program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilannya. Gambar 4.40 menunjukkan fluktuasi penurunan persentase penduduk miskin dari tahun 2002 hingga 2021. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyumas dalam delapan tahun terakhir berfluktuatif namun cenderung menurun. Persentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas tahun 2021 mencapai 13,66 persen.



INDIKATOR 10.1.1(C). JUMLAH DESA TERTINGGAL

GAMBAR 4.42 PERSENTASE DESA TERTINGGAL, 2018



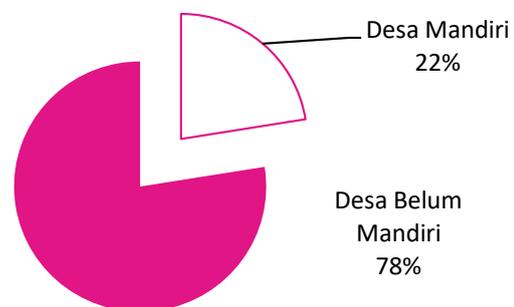
Sumber: Indeks Pembangunan Desa 2018, BPS

Desa tertinggal adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa tertinggal adalah desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan 0,5989 dan lebih besar dari 0,4907. Indikator ini menunjukkan pengurangan jumlah desa tertinggal yang diharapkan telah meningkat ke status desa yang lebih tinggi.

Persentase desa tertinggal di Kabupaten Banyumas hasil pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2018 sebesar nol persen. Artinya sudah tidak ada lagi desa yang memiliki kesejahteraan yang rendah baik dari segi kualitas hidup, kemiskinan, dan sebagainya.

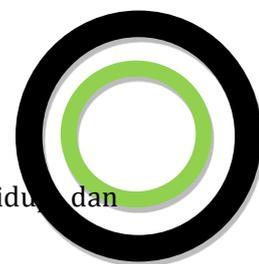
INDIKATOR 10.1.1(D). JUMLAH DESA MANDIRI

GAMBAR 4.43 PERSENTASE DESA MANDIRI, 2018



Sumber: Indeks Pembangunan Desa 2018, BPS

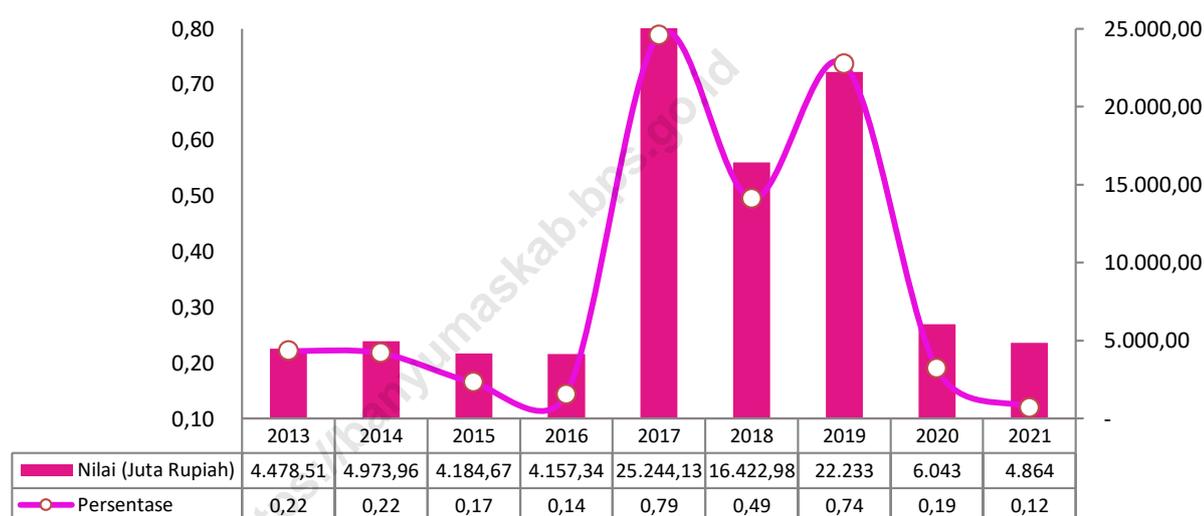
Desa mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa mandiri adalah desa yang memiliki indeks desa membangun lebih besar dari



0,7072. Peningkatan jumlah desa mandiri menunjukkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Kabupaten Banyumas memiliki desa mandiri pada tahun 2018 sebesar 78 persen. Artinya masih ada 22 persen desa yang perlu peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat

GAMBAR 4.44. BANYAKNYA NILAI BELANJA FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PERSENTASE TERHADAP BELANJA PEMERINTAH DAERAH, 2013-2021



Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas

Realisasi belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah tahun 2021 mencapai 4.864 juta rupiah. Pencapaian fungsi perlindungan sosial pada 2013 hingga 2015 secara umum ditunjukkan melalui pelaksanaan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) tahun 2013, program simpanan keluarga sejahtera melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada tahun 2015. BLSM atau KKS merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dan tidak mampu membantu masyarakat miskin dan tidak mampu agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya serta mencegah penurunan taraf kesejahteraan akibat kesulitan ekonomi dan peningkatan cakupan penerima bantuan tunai bersyarat atau Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat miskin dan rentan.

Belanja fungsi perlindungan sosial dan rasio belanja fungsi sosial terhadap belanja pemerintah tertinggi pada tahun 2017 yakni 25.244,13 juta rupiah atau 0,79 persen. Adapun tahun 2016 merupakan belanja fungsi perlindungan sosial terendah yakni 4.184,67 juta rupiah.



TUJUAN 11

MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH, DAN BERKELANJUTAN



Saat ini, lebih dari setengah populasi dunia tinggal di wilayah perkotaan artinya telah terjadi aktivitas perkotaan di sebagian besar belahan bumi. Pada tahun 2030, diproyeksikan bahwa 6 dari 10 orang merupakan penduduk kota. Meskipun banyak tantangan perencanaan, kota menawarkan ekonomi yang lebih efisien dari skala pada berbagai tingkatan, termasuk penyediaan barang, jasa dan transportasi. Dengan suara, perencanaan dan manajemen risiko-informasi, kota bisa menjadi inkubator untuk inovasi, pertumbuhan, dan *driver* dari pembangunan berkelanjutan. Data yang mendukung tujuan ke-11 ini belum tersedia datanya hingga level kabupaten/kota.

Dalam tujuan ke-11 pembangunan berkelanjutan memiliki beberapa target yakni:

- Target 11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar serta menata kawasan kumuh
- Target 11.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap system transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan unruk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan member perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas dan orang tua.
- Target 11.3. Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua Negara.
- Target 11.4. Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia
- Target 11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.
- Target 11.6. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



- Target 11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas.
- Target 11.a. Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
- Target 11.b. Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*.
- Target 11.c. Memberikan dukungan kepada Negara-negara urang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.



TUJUAN 12

MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN



Permasalahan lingkungan yang terus muncul hingga saat ini, tidak terlepas dari pola produksi dan konsumsi yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu diperlukan komitmen perubahan pada produsen dan konsumen melalui pemanfaatan sumberdaya secara efisien. Pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan merupakan upaya perwujudan perubahan secara terpadu dan sistematis dari pola sebelumnya yang tidak ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan oleh semua pemangku kepentingan secara global. Dan diharapkan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan dapat memberikan multi manfaat penting, berupa perubahan pola konsumsi masyarakat yang bertanggung jawab, efisien dan ramah lingkungan. Data pendukung yang berkaitan dengan tujuan ke-12 belum dapat tersedia hingga level kabupaten/kota.

Beberapa target dari tujuan ke-12 yakni:

- Target 12.1. Melaksanakan *the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns*, dengan semua Negara mengambil tindakan, dipimpin Negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas Negara berkembang.
- Target 12.2. Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien.
- Target 12.3. Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.
- Target 12.4. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
- Target 12.5. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali.

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



- Target 12.6. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.
- Target 12.7. Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.
- Target 12.8. Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam
- Target 12.a. Mendukung Negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.
- Target 12.b. Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk local.
- Target 12.c. Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya, yang dicerminkan oleh dampak lingkungannya dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus Negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena dampak.



TUJUAN 13

MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA



Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rentan terkena bencana yang terkait dengan perubahan iklim. Mengingat perubahan iklim berdampak terhadap banyak sektor, maka dibutuhkan penanganan yang menyeluruh dan koordinasi yang baik antar sektor. Dengan kondisi sebagai Negara berkembang, kemampuan Indonesia dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim belum sebaik negara-negara maju. Dikhawatirkan pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah bisa terhambat karena dampak perubahan iklim tersebut. Untuk itu pada tujuan ini diharapkan pemerintah mengambil tindakan cepat dalam mengatasi perubahan iklim dan dampak yang terjadi dengan memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim bencana alam. Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional dan meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangandampak dan peringatan dini perubahan iklim. Data yang mendukung tujuan ke-13 belum dapat disajikan hingga level kabupaten/kota.

Berikut target dalam tujuan ke-13:

- Target 13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua Negara.
- Target 13.2. Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.
- Target 13.3. Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.
- Target 13.a. Melaksanakan komitmen Negara maju pada *the United Nations Framework Convention on Climate Change* untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar dollar Amerika per tahun pada tahun 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan Negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalisasi secara penuh *the Green Climate Fund* melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin.

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Target 13.b. Menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim di Negara kurang berkembang, Negara berkembang pulau kecil, termasuk fokus pada perempuan, pemuda, serta masyarakat lokal dan marjinal.

<https://banyumaskab.bps.go.id>



TUJUAN 14

MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN



Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai terpanjang ke dua di dunia serta luas wilayah laut mencapai hampir dua pertiga dari total wilayah. Potensi sumber daya pesisir dan lautan yang besar ini merupakan sumber daya bagi pembangunan nasional. Secara umum, laut merupakan pendukung kehidupan, penentu siklus hidrologi dan iklim, penyedia sumber daya alam, media transportasi, penyedia jasa-jasa lingkungan, dan tempat mencari pendapatan bagi sebagian penduduk. Oleh karena itu pembangunan di wilayah laut dan pesisir menjadi salah satu prioritas pembangunan di berbagai Negara untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan penduduk, meningkatkan daya tarik wisata, dan secara tidak langsung meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah pesisir.

Dengan kondisi tersebut sudah seharusnya arus pembangunan berbasis pesisir dan laut ini akan memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemanfaatan potensi sumber daya pesisir dan kelautan selain memberikan dampak yang positif juga memberikan dampak yang negatif terhadap sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari sisi ekonomi, manfaat yang banyak diperoleh dari akses ke laut, pesisir, perikanan, pariwisata dan rekreasi mengakibatkan pembangunan pemukiman penduduk seringkali terkonsentrasi di zona pesisir. Meningkatnya kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi di zona pesisir mengakibatkan tekanan terhadap ekosistem laut dan pesisir juga meningkat. Dari sisi lingkungan, tekanan terhadap wilayah laut dan pesisir dapat merusak ekosistem laut dan menyebabkan punahnya keanekaragaman hayati. Tekanan terhadap wilayah laut dan pesisir yang sering terjadi adalah konversi habitat, perubahan tutupan lahan, dan beban polutan. Tekanan ini juga dapat menyebabkan kepunahan berbagai jenis organisme laut, pemutihan terumbu karang, penyakit baru diantara organisme, munculnya alga berbahaya, pelumpuran, kualitas air berkurang dan ancaman bagi kesehatan manusia melalui racun pada ikan, kerang dan patogen.



Berikut target dalam tujuan ke-14 pembangunan berkelanjutan:

- Target 14.1. Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.
- Target 14.2. Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.
- Target 14.3. Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah yang lebih baik di semua tingkatan.
- Target 14.4. Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemameman dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.
- Target 14.5. Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.
- Target 14.6. Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk Negara berkembang dan Negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada *the World Trade Organization*.
- Target 14.7. Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi bagi Negara berkembang kepulauan kecil dan Negara kurang berkembang dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata yang berkelanjutan.
- Target 14.a. Meningkatkan pengetahuan, ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan *the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines* tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi



Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan Negara berkembang, khususnya Negara berkembang kepulauan kecil dan Negara kurang berkembang.

- Target 14.b. Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (*small scale artisanal fishers*) terhadap sumber daya laut dan pasar.
- Target 14.c. Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam *the United Nations Convention on the Law of the Sea*, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari *"The future we want"*.

<https://banyumaskab.bps.go.id>



TUJUAN 15

MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN



Tujuan ke-15 dalam pembangunan berkelanjutan yakni melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Dalam mencapai tujuan, diperlukan target yang sesuai. Namun data pendukung untuk menggambarkan indikator belum tersedia datanya hingga level kabupaten/kota.

Target dalam tujuan ke-15 pembangunan berkelanjutan sebagai berikut

- Target 15.1. Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.
- Target 15.2. Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan deforestasi secara global.
- Target 15.3. Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.
- Target 15.4. Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.



Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

- Target 15.5. Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati dan pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.
- Target 15.6. Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.
- Target 15.7. Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk kehidupan liar secara illegal.
- Target 15.8. Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan mengurangi dampak dari jenis asing invasive pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasive prioritas.
- Target 15.9. Pada tahun 2020 mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.
- Target 15.a. Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestasikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan.
- Target 15.b. Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi Negara berkembang untuk memajukan pengelolaannya termasuk untuk pelestarian dan reforestasi.
- Target 15.c. Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.



TUJUAN 16

MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN



Perdamaian, stabilitas, hak-hak asasi manusia dan pemerintahan efektif, transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan hukum adalah komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi masih ada beberapa wilayah yang menghadapi konflik dan kekerasan. Konflik dan kekerasan tersebut dapat menghambat pembangunan negara. Tidak hanya itu, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, tindak kejahatan, dan eksploitasi juga perlu terus ditingkatkan. Oleh karena itu, tujuan mendorong perdamaian dan keadilan menjadi salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

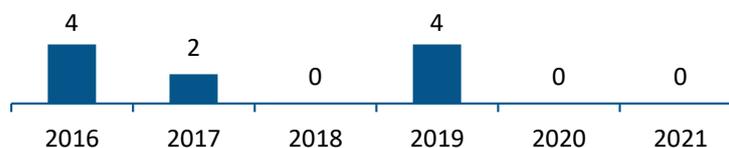
TARGET 16.1. SECARA SIGNIFIKAN MENGURANGI SEGALA BENTUK KEKERASAN DAN TERKAIT ANGKA KEMATIAN DIMANAPUN

INDIKATOR 16.1.1. ANGKA KORBAN KEJAHATAN PEMBUNUHAN PER 100.000 PENDUDUK

Indikator ini merupakan indikator global yang akan dikembangkan dan memiliki proksi indikator, yaitu jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.

INDIKATOR 16.1.1.(A)JUMLAH KASUS KEJAHATAN PEMBUNUHAN PADA SATU TAHUN TERAKHIR

GAMBAR 4.45 JUMLAH KASUS KEJAHATAN PEMBUNUHAN, 2016-2021



Sumber: Polres Banyumas



Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pada tahun 2021 tidak ada kasus pembunuhan di Kabupaten Banyumas. Angka ini menurun dari tahun 2019 yang sebelumnya terdapat empat kasus pembunuhan. Hal ini menunjukkan meningkatnya tingkat keamanan di Kabupaten Banyumas.

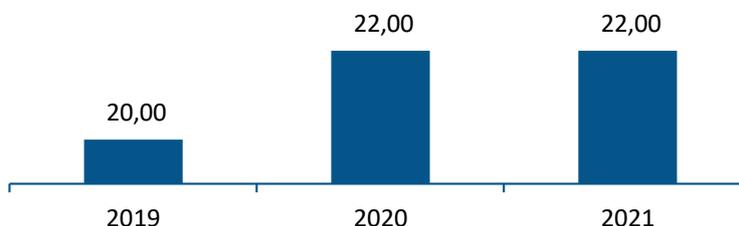
TARGET 16.7. MENJAMIN PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG RESPONSIF, INKLUSIF, PARTISIPATIF DAN REPRESENTATIF DI SETIAP TINGKATAN

INDIKATOR 16.7.1. PROPORSI JABATAN DI LEMBAGA PUBLIK

Ukuran ini dapat menggambarkan terjaminnya pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif, karena adanya keragaman perwakilan di semua tingkat lembaga publik. Indikator ini akan dikembangkan dan diproksi dengan dua indikator nasional, yaitu persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).

INDIKATOR 16.7.1.(A) PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

GAMBAR 4.46 PERSENTASE ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) YANG BERJENIS KELAMIN PEREMPUAN (PERSEN), 2019-2021



Sumber: Publikasi Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2020-2022

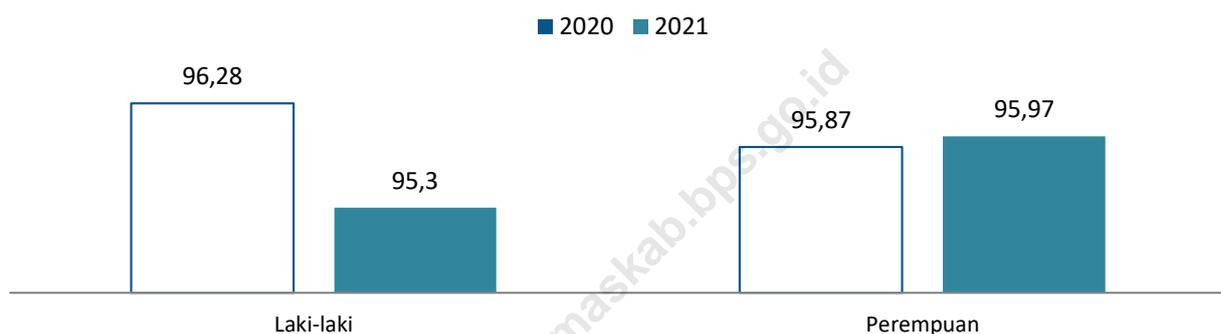
Ukuran ini menggambarkan terjaminnya pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif, karena adanya keragaman perwakilan di semua tingkat lembaga publik. Selama tahun 2019 hingga 2021, keterwakilan perempuan di DPRD mengalami peningkatan dari 20 persen menjadi 22 persen. Hal ini menandakan meningkatnya partisipasi politik perempuan dalam menetapkan kebijakan publik.



TARGET 16.9. PADA TAHUN 2030, MEMBERIKAN IDENTITAS YANG SAH BAGI SEMUA, TERMASUK PENCATATAN KELAHIRAN

INDIKATOR 16.9.1(B) PERSENTASE ANAK YANG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN

GAMBAR 4.47 PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 0-17 TAHUN YANG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN MENURUT KARAKTERISTIK, 2020-2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) – BPS

Akta kelahiran merupakan tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran di Kabupaten Banyumas diperoleh dari data Susenas dengan membagi jumlah anak umur kurang dari 18 tahun yang memiliki akta kelahiran dengan jumlah anak umur kurang dari 18 tahun. Jika diklasifikasikan menurut karakteristik jenis kelamin, kelompok pengeluaran dan pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, sebagian besar anak yang memiliki akta kelahiran yakni mereka yang berasal dari keluarga mampu (memiliki pengeluaran 20 persen teratas) dan berasal dari keluarga yang memiliki pendidikan yang cukup tinggi (SMP ke atas). Pengklasifikasian menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa anak laki-laki memiliki akta kelahiran lebih banyak dibandingkan anak perempuan. Persentase penduduk berumur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran pada tahun 2020 sebanyak 96,09 persen sedangkan tahun 2021 sebanyak 95,63 persen.



TUJUAN 17

MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan komitmen yang kuat pada kemitraan dan kerja sama di tingkat global. Pemenuhan target pembangunan harus dilakukan dengan meningkatkan dukungan semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, PBB, dan pemeran aktor global lainnya. Kemitraan ini juga dilaksanakan untuk mengembangkan Negara-negara, khususnya negara-negara tertinggal. Pengembangan ini dilakukan salah satunya dengan mendorong perdagangan internasional dan membantu Negara berkembang meningkatkan ekspor.

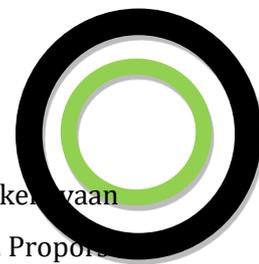
TARGET 17.1. MEMPERKUAT MOBILISASI SUMBER DAYA DOMESTIK, TERMASUK MELALUI DUKUNGAN INTERNASIONAL KEPADA NEGARA BERKEMBANG, UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS LOKAL BAGI PENGUMPULAN PAJAK DAN PENDAPATAN LAINNYA

INDIKATOR 17.1.1*. TOTAL PENDAPATAN PEMERINTAH TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

GAMBAR 4.48 PROPORSI REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, 2018-2021



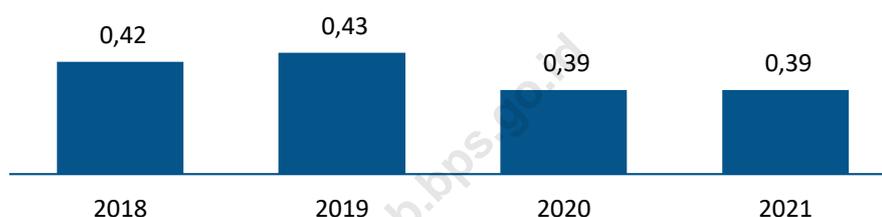
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas (diolah)



Pendapatan pemerintah adalah hak pemerintah pusat sebagai penambah keuangan bersih yang terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak (PNBP), dan hibah. Proporsi realisasi pendapatan pemerintah terhadap PDRB Kabupaten Banyumas tahun 2021 sebesar 6,04 persen. Sepanjang tahun 2018-2021 nilai proporsi pendapatan pemerintah terhadap PDRB Kabupaten Banyumas berada di sekitar 5,71 sampai 6,55 persen.

INDIKATOR 17.1.1(A). RASIO PENERIMAAN PAJAK TERHADAP PDRB

GAMBAR 4.49 RASIO PENERIMAAN PAJAK TERHADAP PDRB, 2018-2021



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas (diolah)

Penerimaan pajak pemerintah adalah penerimaan daerah yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak dalam negeri berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai dan pendapatan pajak lainnya. Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB diperoleh dengan membagi pendapatan pajak daerah dengan PDRB Kabupaten Banyumas. Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB tahun 2020 dan 2021 sama yakni 0,39 persen. Jika dilihat dalam empat tahun terakhir, rasio penerimaan pajak tahun 2019 merupakan capaian tertinggi.

TARGET 17.8. MENGOPERASIONALISASIKAN SECARA PENUH BANK TEKNOLOGI DAN SAINS, MEKANISME PEMBANGUNAN KAPASITAS TEKNOLOGI DAN INOVASI UNTUK NEGARA KURANG BERKEMBANG PADA TAHUN 2017 DAN MENINGKATKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI YANG MEMAMPUKAN,

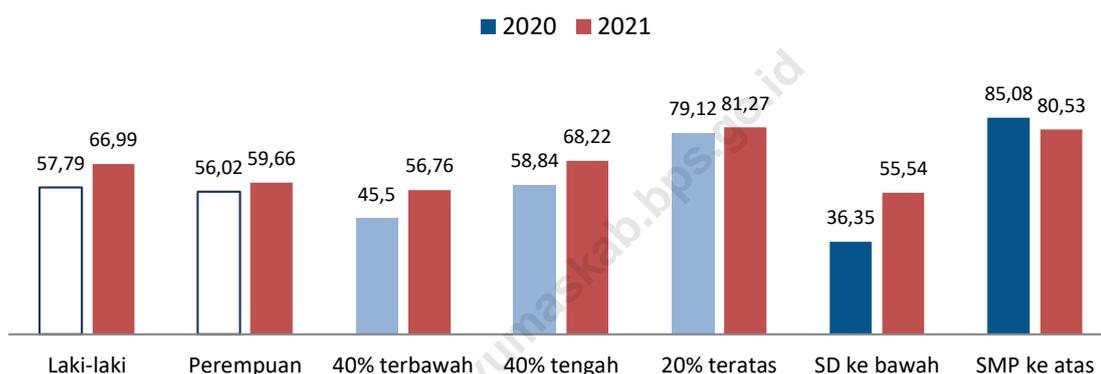


Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

KHUSUSNYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

INDIKATOR 17.8.1*. PROPORSI INDIVIDU YANG MENGGUNAKAN INTERNET

GAMBAR 4.50 PERSENTASE ANGGOTA RUMAH TANGGA BERUSIA 5 TAHUN KE ATAS YANG MENGAKSES INTERNET SELAMA TIGA BULAN TERAKHIR MENURUT KARAKTERISTIK, 2020-2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) – BPS

Proporsi individu yang menggunakan internet dari berbagai macam lokasi dalam tiga bulan terakhir, baik dengan komputer, telepon seluler, tablet, PDA, peralatan games, TV digital, dsb baik menggunakan jaringan tetap (*fixed*) maupun mobile. Angka ini diperoleh dari Susenas dengan membagi jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet dengan jumlah penduduk.

Persentase pengguna internet di Kabupaten Banyumas pada 2021 sebesar 66,31 persen atau meningkat sebesar 8,71 poin dari tahun 2020. Jika dilihat menurut kelompok pengeluaran dan pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, pengguna internet di Banyumas paling banyak berasal dari rumah tangga mampu (kelompok pengeluaran 20% teratas) yakni 81,27 persen pada tahun 2021 dan 79,12 persen pada tahun 2020 dan berpendidikan (pendidikan kepala rumah tangga SMP ke atas) yakni 80,53 persen pada tahun 2021 dan 85,08 persen pada tahun 2020.



TARGET 17.13. MENINGKATKAN STABILITAS MAKROEKONOMI GLOBAL, TERMASUK MELALUI KOORDINASI KEBIJAKAN DAN KETERPADUAN KEBIJAKAN

INDIKATOR 17.13.1* TERSEDIANYA

DASHBOARD

MAKROEKONOMI

GAMBAR 4.51 LAJU PERTUMBUHAN YEAR ON YEAR PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PERSEN), 2017-2021



Sumber: Publikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Banyumas 2022

Laju pertumbuhan *year on year* PDRB Kabupaten Banyumas tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan nilai yang fluktuatif. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas mengalami kontraksi sebesar 1,65 persen. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid dimana perekonomian mengalami sedikit kelumpuhan, banyak tenaga kerja di PHK, sekolah diliburkan dan dilakukan sekolah secara online yang berakibat pada matinya perputaran ekonomi sektor transportasi. Laju pertumbuhan Kabupaten Banyumas tahun 2021 mencapai 4 persen. Capaian laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 menunjukkan bangkitnya perekonomian di Kabupaten Banyumas. Indikator laju pertumbuhan ekonomi digunakan untuk melihat stabilitas ekonomi di suatu daerah.

TARGET 17.18. PADA TAHUN 2020, MENINGKATKAN DUKUNGAN PENGEMBANGAN KAPASITAS UNTUK NEGARA BERKEMBANG, TERMASUK NEGARA KURANG BERKEMBANG DAN NEGARA BERKEMBANG PULAU KECIL, UNTUK MENINGKATKAN SECARA SIGNIFIKAN KETERSEDIAAN DATA BERKUALITAS TINGGI, TEPAT WAKTU DAN DAPAT DIPERCAYA,



Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

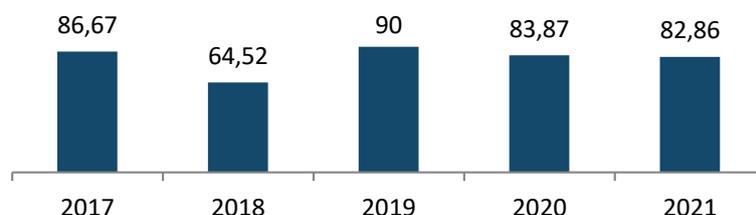
YANG TERPILAH BERDASARKAN PENDAPATAN, GENDER, UMUR, RAS, ETNIS, STATUS MIGRASI, DIFABILITAS, LOKASI GEOGRAFIS DAN KARAKTERISTIK LAINNYA YANG RELEVAN DENGAN KONTEKS NASIONAL

INDIKATOR 17.8.1 PROPORSI INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG DIHASILKAN DI TINGKAT NASIONAL DENGAN KETERPILAHAN DATA LENGKAP YANG RELEVAN DENGAN TARGENYA, YANG SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP FUNDAMENTAL DARI STATISTIK RESMI

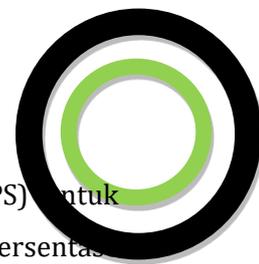
Kemampuan Kantor Statistik Nasional dan badan-badan lain dalam negara untuk melaporkan keanekaragaman dalam indikator TPB merupakan ukuran kapasitas dari badan tersebut. Indikator global ini diproksi dengan empat indikator nasional, yaitu (1) Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik; (2) Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama; (3) Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa); dan (4) Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.

INDIKATOR 17.8.1(B) PERSENTASE KONSUMEN YANG MENJADIKAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK BPS SEBAGAI RUJUKAN UTAMA

GAMBAR 4.52 PERSENTASE KONSUMEN YANG MENJADIKAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK BPS SEBAGAI RUJUKAN UTAMA, 2017-2021



Sumber: Survei Kebutuhan Data - BPS Kabupaten Banyumas



Indikator rujukan utama ini mengukur kemampuan lembaga statistik (BPS) untuk menghasilkan data dan informasi statistik. Gambar 17.5. menunjukkan bahwa persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama meningkat dari 64,52 persen menjadi 90 persen. Fakta tersebut menunjukkan meningkatnya tingkat kepercayaan pengguna data terhadap data yang disediakan BPS.

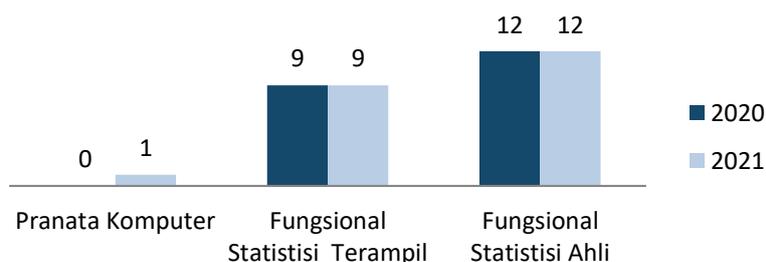
INDIKATOR 17.8.1(C) JUMLAH METADATA KEGIATAN STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS YANG TERDAPAT DALAM SISTEM

Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus BPS Kabupaten Banyumas yang terdapat dalam Sirusa belum ada.

TARGET 17.19 PADA TAHUN 2030, MENGANDALKAN INISIATIF YANG SUDAH ADA, UNTUK MENGEMBANGKAN PENGUKURAN ATAS KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG MELENGKAPI PDRB DAN MENDUKUNG PENGEMBANGAN KAPASITAS STATISTIK DI NEGARA BERKEMBANG

INDIKATOR 17.19.1(A). JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL STATISTISI DAN PRANATA KOMPUTER PADA KEMENTERIAN /LEMBAGA

GAMBAR 4.53 JUMLAH PRANATA KOMPUTER DAN PEJABAT FUNGSIONAL STATISTISI BERSTATUS AKTIF DI BPS KABUPATEN BANYUMAS 2020-2021



Sumber: BPS Kabupaten Banyumas



Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pada akhir Oktober 2021, jumlah pejabat fungsional pranata komputer di BPS Kabupaten Banyumas sebanyak 1 orang, fungsional statistisi sebanyak 21 orang yang terdiri dari 9 orang statistisi terampil dan 12 orang statistisi ahli.

INDIKATOR 17.19.2(C). JUMLAH PENGUNJUNG EKSTERNAL YANG MENGAKSES DATA DAN INFORMASI STATISTIK MELALUI *WEBSITE*

GAMBAR 4.54 JUMLAH PENGUNJUNG *WEBSITE* BPS KABUPATEN BANYUMAS, 2017-2021



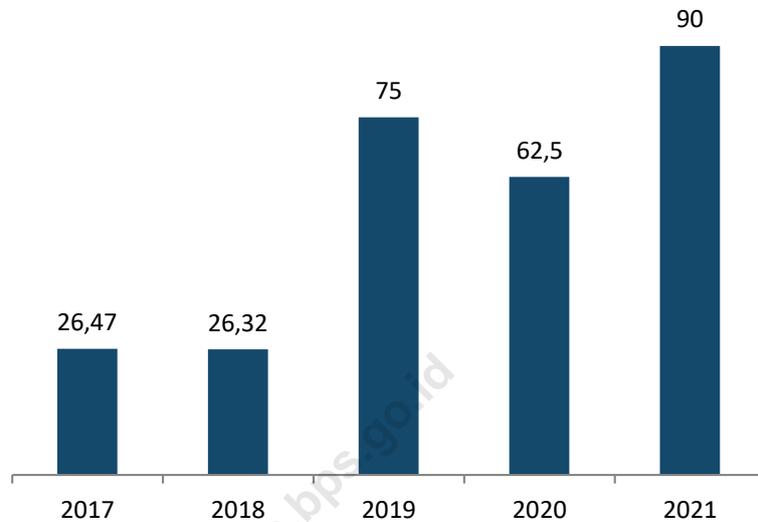
Sumber: Survei Kebutuhan Data - BPS Kabupaten Banyumas

Jumlah pengunjung *website* BPS Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2021. Sepanjang 5 tahun terakhir, jumlah pengunjung terbanyak pada tahun 2020 yakni 59.136 pengunjung. Meskipun jumlah pengunjung *website* BPS Kabupaten Banyumas mengalami penurunan, namun jumlah pengunjung *website* menunjukkan angka yang cukup besar. Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan publik terhadap data yang disajikan oleh BPS.

INDIKATOR 17.19.2(E). PERSENTASE KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN DATA BPS DALAM PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN NASIONAL



GAMBAR 4.55 PERSENTASE KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN DATA BPS DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN, 2017-2021



Sumber: Survei Kebutuhan Data - BPS Kabupaten Banyumas

Selama tahun 2017-2021, persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi mengalami peningkatan. Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2021 menunjukkan persentase tertinggi yakni sebanyak 90 persen.

DAFTAR PUSTAKA

<https://banyumaskab.bps.go.id>





DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik. *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. 2021. Jakarta
2. Badan Pusat Statistik. *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. 2020. Jakarta
3. *Indeks Pembangunan Desa Jawa Tengah*. 2018. Semarang
4. *Kabupaten Banyumas Dalam Angka*. 2021. Purwokerto
5. *Kabupaten Banyumas Dalam Angka*. 2020. Purwokerto
6. *Kabupaten Banyumas Dalam Angka*. 2019. Purwokerto
7. *Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah Agustus 2021*. Semarang
8. *Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah Agustus 2020*. Semarang
9. *Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Banyumas Hasil Sakernas*. 2021. Purwokerto
10. *Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Banyumas Hasil Sakernas*. 2020. Purwokerto
11. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyumas*. 2021. Purwokerto
12. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyumas*. 2020. Purwokerto
13. *Statistik Potensi Desa Kabupaten Banyumas*. 2018. Purwokerto
14. Hoelman, Mickael B. dkk. *Panduan SDGs untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah* 2015. Jakarta

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANYUMAS**

Jl. Warga Bhakti No.5, Purwokerto
Kabupaten Banyumas Jawa Tengah
Telp. 0281-635496 Fax: 0281-624865
Homepage: <https://banyumaskab.bps.go.id>
Email: bps3302@bps.go.id